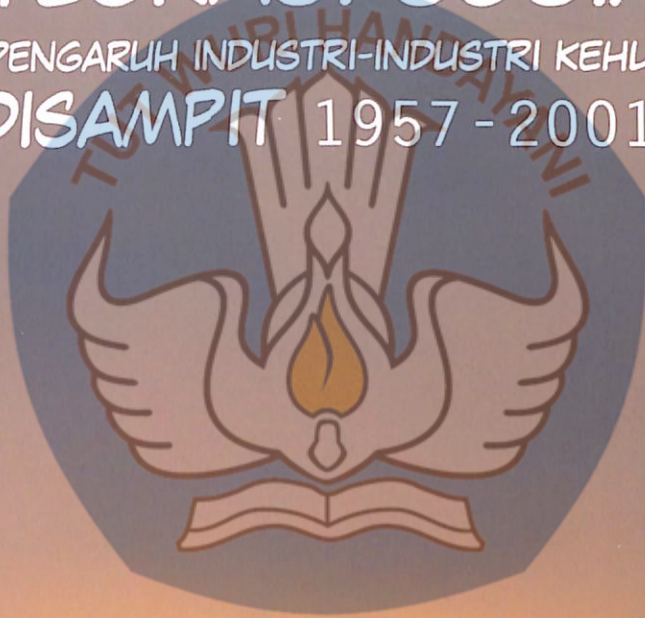




DINAMIKA DAN INTEGRASI SOSIAL

DALAM PENGARUH INDUSTRI-INDUSTRI KEHUTANAN

DISAMPIT 1957 - 2001



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

(900-909)
C

Moch. Andri WP
Hendraswati
Zulfa Jamalie

Moch. Andri WP
Hendraswati
Zulfa Jamalie



**DINAMIKA DAN
INTEGRASI SOSIAL**

DALAM PENGARUH INDUSTRI-INDUSTRI KEHUTANAN
DISAMPIT 1957-2001

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**





DINAMIKA DAN INTEGRASI SOSIAL

Penulis: Moch. Andri WP, Hendraswati, Zulfa Jamalie
Editor: Veni Putri
Tata Sampul: Wulan
Tata Isi: Ansara
Pracetak: Antini, Dwi, Wardi

Cetakan Pertama, Desember 2018

Penerbit
DIVA Press
(Anggota IKAPI)
Sampangan Gg. Perkutut No.325-B
Jl. Wonosari, Baturetno
Banguntapan Yogyakarta
Telp: (0274) 4353776, 081804374879
Fax: (0274) 4353776
E-mail:redaksi_divapress@yahoo.com
sekred.divapress@gmail.com
Blog: www.blogdivapress.com
Website: www.divapress-online.com

Balai Pelestarian Nilai Budaya

Kalimantan Barat

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

WP, Moch. Andri, Hendraswati, Zulfa Jamalie

Dinamika dan Integrasi Sosial/Moch. Andri WP, Hendraswati, Zulfa Jamalie; editor, Veni Putri—
cet. 1—Yogyakarta: DIVA Press, 2018

92 hlmn; 15, 5 x 23 cm
ISBN 978-602-391-677-1

I. Penelitian
II. Veni Putri

I. Judul

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



Abstrak

Tulisan ini disusun untuk menggambarkan dinamika dan integrasi sosial di Kota Sampit dalam kurun waktu tahun 1957 hingga 2001, terutama dalam pengaruh industri-industri kehutanannya yang marak terjadi di sekitar Kota Sampit. Uraian disusun untuk memahami kondisi Sampit dan dinamika perkembangannya, industri kehutan, dan pengaruhnya terhadap perkembangan Kota Sampit, serta dinamika dan integrasi sosial yang terjadi pada struktur masyarakat Kota Sampit.



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**



Pengantar Penulis

Sampit mungkin hanya dikenal oleh sebagian orang karena peristiwa kerusuhan konflik sosial antarkelompok etnis yang terjadi tahun 2001. Peristiwa yang sebenarnya cukup mengejutkan bagi banyak kalangan. Selain karena baru pertama kali terjadi, dampaknya yang begitu sangat luar biasa bagi kehidupan bersama juga telah mencederai sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat Sampit saat itu.

Namun, jauh sebelum saat itu, Sampit sebenarnya juga sudah mulai dikenal oleh banyak kalangan dari luar. Terutama ketika dibukanya pelabuhan Sampit bersamaan dengan 16 pelabuhan lain di Jawa dan 2 di Sumatra oleh Belanda tahun 1865 yang juga menandai mulai maraknya aktivitas-aktivitas perdagangan di Sampit.

Perkembangan penting Sampit selanjutnya adalah ketika *Bruynzeel Dayak Houtbedrijven NV* didirikan oleh Belanda sebagai pabrik pengolahan kayu terbesar di Asia pada tahun 1947. Seiring

dengan pengambilalihan dan perubahan status kepemilikannya oleh Indonesia pada paruh kedua dekade 1950-an, *Bruynzeel* justru semakin jauh berkembang dan mempengaruhi arah perkembangan Kota Sampit selanjutnya.

Maraknya industri-industri kehutanan di Kabupaten Kotawaringin Timur pada paruh pertama dekade 1970-an seperti menegaskan kembali bahwa selain sebagai kota perdagangan, Sampit juga merupakan pusat industri. Hal ini selain karena keberadaan aktivitas *Bruynzeel*, banyak industri pengolahan kayu, baik itu berupa pabrik-pabrik besar maupun kecil berdiri di wilayah sekitar Kota Sampit. Terutama di sepanjang aliran Sungai Mentaya yang membelah Kota Sampit, dan anak-anak sungainya.

Maraknya perkembangan eksploitasi dan industri-industri kehutanan yang terjadi, membuat distribusi nilai ekonomi, bahkan peredaran uang tunai di masyarakat menjadi begitu sangat tinggi. Karena sebagian aktivitas eksploitasi dan pengolahan hasil kayu hutannya memang melibatkan masyarakat sekitar secara langsung. Pada gilirannya, Kota Sampit dalam perannya sebagai pusat-pusat aktivitas dan pemerintahan menjadi semakin marak dengan berkembangnya efek berganda (*multiplier effect*) dari kegiatan eksploitasi dan industri-industri kehutanan tersebut.

Tulisan ini sendiri justru ditujukan untuk mengurai pengaruh industri-industri kehutanan tersebut terhadap dinamika dan integrasi sosial yang terbentuk saat itu. Terutama ketika awal-awal berkembangnya *Bruynzeel* setelah pengambilalihan oleh Indonesia dan maraknya industri-industri kehutanan, hingga munculnya peristiwa disintegrasi sosial di Kota Sampit. Tulisan ini tentu masih jauh dalam menyajikan hasil telaah dan informasi yang utuh untuk memahami dinamika dan integrasi sosial yang terbentuk di Kota Sampit. Terutama dalam kurun waktu berdirinya

Kalimantan Tengah sebagai daerah swatantra atau provinsi tahun 1957, hingga terjadinya disintegrasi atau kerusuhan sosial tahun 2001.

Ucapan terima kasih ditujukan untuk semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan tulisan ini. Para tetua dan tokoh masyarakat serta semua informan yang telah memberikan informasi sekaligus pemahaman terhadap penulis, Prof. Dr. Erwiza Erman yang telah memberikan arahan dan masukan bagi tulisan ini, rekan-rekan kantor BPNB, dan semua yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Semoga tulisan yang masih sangat sederhana ini dapat menambah perspektif bagi upaya-upaya pelestarian dan perlindungan nilai-nilai budaya Indonesia, khususnya di Kotawaringin Timur.

Desember 2018

Moch. Andri WP

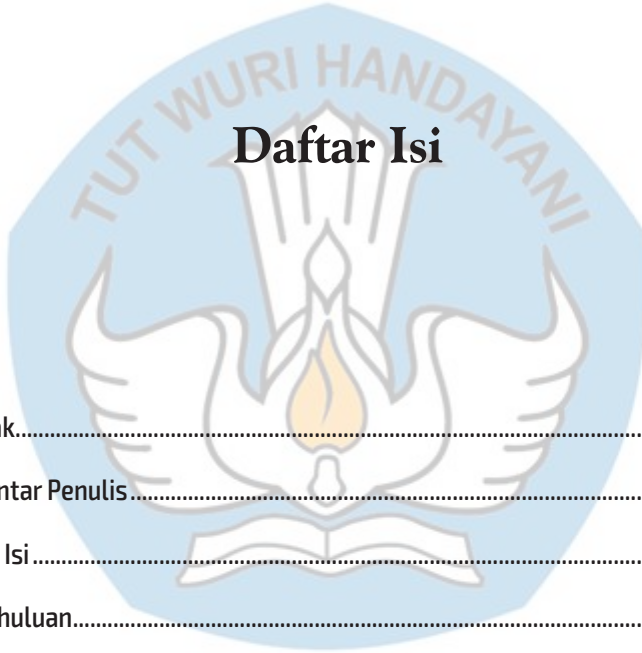
Hendraswati

Zulfa Jamalie

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**



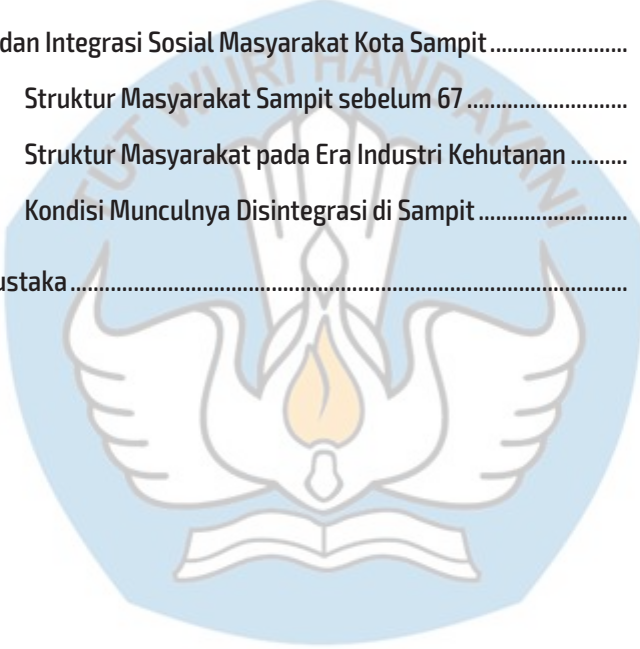
**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**



Daftar Isi

Abstrak.....	3
Pengantar Penulis.....	5
Daftar Isi	9
Pendahuluan.....	11
Profil Singkat Kabupaten Kotawaringin Timur	17
<hr/>	
1. Sampit sebagai Ibu Kota Kotawaringin Timur.....	17
2. Kondisi Geografis Kotawaringin Timur	19
3. Kondisi Kependudukan	22
4. Angka Partisipasi dan Sarana Pendidikan	24
5. Ketenagakerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi	26
Sampit dan Dinamika Perkembangannya	29
1. Asal Usul dan Perkembangan Awal Sampit	29
2. Bruynzeel dan Perubahan Status Kepemilikannya.....	34
3. Maraknya Industri Pengolahan Kayu Hasil Hutan	39

Industri Kehutanan dan Pengaruhnya terhadap Sampit.....	47
1. Masa-Masa Awal Bruynzeel hingga 1960-an	48
2. Era Industri Kehutanan; Emas Hijau di Sampit	56
Struktur dan Integrasi Sosial Masyarakat Kota Sampit	67
1. Struktur Masyarakat Sampit sebelum 1967	68
2. Struktur Masyarakat pada Era Industri Kehutanan	71
3. Kondisi Munculnya Disintegrasi di Sampit	76
Daftar Pustaka	87



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



Pendahuluan

Sampit pernah menjadi daerah yang cukup dikenal di Indonesia karena peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu. Peristiwa yang dikenal karena dampaknya yang luar biasa. Dampaknya yang telah mencederai, bahkan mengoyak sendi-sendi kehidupan bersama di antara mereka. Peristiwa kerusuhan sosial yang terjadi lantaran eskalasi konflik atau pertentangan antarkelompok masyarakat etnik pada tahun 2001. Satu peristiwa yang mungkin tidak pernah ada satu pun dari mereka ingin mengulang kembali ke masa-masa lalu itu. Cukup sudah hanya menjadi catatan dalam lembaran kelim sejarah masyarakatnya yang pernah terjadi di Kota Sampit, atau Kotawaringin Timur secara umum.

Berpuluh-puluh tahun kemudian, Sampit mulai bangkit kembali dari keterpurukan, dan kini bahkan mampu menjelma menjadi salah satu kota yang paling kondusif bagi semua orang. Masyarakatnya yang terdiri atas Dayak, Banjar, Tionghoa, Jawa,

Madura, dan lainnya kini telah kembali dalam kehidupan bersama mereka yang aman dan damai.

Disadari bahwa untuk membangun kembali Sampit yang kondusif bukan perkara yang mudah. Dibutuhkan suatu *trust* atau kepercayaan yang tinggi, upaya yang sangat kuat untuk melupakan trauma-trauma sejarah sosial di masa lalu, serta komitmen dan kerja sama yang baik antarberbagai kepentingan sebagai modal sosial untuk mengembalikan Sampit menjadi kota yang aman dan kondusif bagi semua orang dan kelompok. Hingga pada akhirnya, Sampit atau Kotawaringin Timur secara umum menjadi salah satu kota atau wilayah paling aman dan kondusif bagi arus masuk modal atau investasi, bahkan dengan status pertumbuhan ekonominya yang tertinggi di Kalimantan Tengah.¹

Jauh sebelum peristiwa itu, Sampit sesungguhnya sudah mulai dikenal luas oleh banyak orang luar sejak zaman Hindia Belanda. Diawali dengan pembukaan pelabuhan Sampit oleh Belanda bersamaan dengan 16 pelabuhan lainnya di Jawa dan 2 di Sumatra pada tahun 1865. Pembukaan pelabuhan ini tentu telah menandai adanya interaksi perdagangan antara masyarakat Sampit dengan dunia luar sejak saat itu. Termasuk juga pengembangan komoditas perdagangan, seperti karet, kelapa, dan sawit dalam skala perkebunan-perkebunan besar pada awal abad XX.

Setelah itu, berdirinya brensel (*bruynzeel*) sebagai pabrik pengolahan kayu hasil hutan terbesar di Kalimantan pada tahun 1947 oleh Belanda juga semakin menandai adanya interaksi perdagangan dengan dunia luar, terutama komoditas kayu hasil

¹ Selama kurun waktu 5 tahun, kecuali pada tahun 2009, laju pertumbuhan ekonomi di Kotawaringin Timur telah mengalami peningkatan yang cukup pesat, yaitu dari 6,27% pada tahun 2007 menjadi 7,7% pada tahun 2011. Angka pertumbuhan ini menjadi yang tertinggi dari rata-rata angka pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah saat itu.

hutan. Bahkan, setelah diambil alih oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1955, aktivitas pabrik pengolahan kayu ini justru mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari sisi pengelolaan luas areal hutannya, kapasitas produksinya, maupun orang-orang lokal yang terlibat dalam aktivitasnya, dari hulu hingga hilir.

Setelah diikuti oleh kehadiran banyaknya perusahaan hutan dan pabrik-pabrik pengolahan hasil kayunya oleh swasta di wilayah sekitar, Sampit kemudian mengalami perkembangan yang sangat pesat. Aktivitas-aktivitas di pusat kota dan lalu-lalang kapal-kapal pengangkut kayu pada sungai yang melintasinya telah menjadi bagian dari kesibukan dan peradaban Sampit yang semakin maju. Berkembangnya jumlah penduduk, wilayah, fasilitas-fasilitas pasar, perkantoran, serta aktivitas-aktivitas ekonominya menjadikan Sampit sebagai salah satu kota tersibuk di Kalimantan Tengah saat itu.

Akan tetapi, peristiwa-peristiwa kerusuhan sosial akibat konflik kekerasan antarkelompok etnik yang terjadi pada tahun 2001 menjadi titik balik terendah dari perkembangan dan peradaban Kota Sampit dan masyarakatnya. Integrasi dari struktur sosial yang sudah terbangun dan terbentuk berpuluh-puluh tahun menjadi hancur dan hilang seketika karena peristiwa tersebut.

Lalu, ada apa sesungguhnya dengan Sampit? Apa yang terjadi dengan struktur masyarakatnya saat itu, atau bahkan mungkin jauh sebelum itu? Bagaimana sesungguhnya dinamika dan integrasi sosial yang terbentuk dan terbangun selama berpuluh-puluh tahun sebelumnya? Hal ini tentu membutuhkan banyak jawaban dari telaah aspek sejarah dan struktur masyarakatnya yang terbentuk. Tulisan ini sendiri merupakan hasil dari proses penelitian yang dilakukan dalam menelaah dinamika dan integrasi

sosial yang terbentuk sebelumnya hingga peristiwa kelam itu terjadi. Terutama untuk memahami bentuk dan dinamika perubahan struktur sosial, dinamika hubungan dan pola-pola integrasi antaretnik yang pernah berlangsung, serta faktor-faktor yang mendasari munculnya peristiwa konflik sosial. Terutama dalam kurun waktu setelah Kalimantan Tengah dan Kotawaringin Timur berdiri sebagai provinsi dan kabupaten tahun 1957 hingga tahun 2001.

Ada tiga pertanyaan penting yang mendasari tulisan ini terbentuk. *Pertama*, kapan dan bagaimana perkembangan Kota Sampit dan industri-industri kehutanannya mulai terjadi? *Kedua*, apakah maraknya industri-industri kehutan tersebut mempengaruhi dinamika perkembangan Sampit? *Ketiga*, bagaimana struktur masyarakatnya selama itu terbentuk dan apa yang menyebabkan munculnya disintegrasi dalam struktur sosialnya yang terbentuk saat itu?

Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *integration*, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2009), integrasi diartikan sebagai pembauran sesuatu yang tertentu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Istilah pembauran dimaksud mengandung pengertian sebagai upaya masuk ke dalam, menyesuaikan, menyatu, dan atau melebur sehingga menjadi satu.

Soerjono Soekanto, dalam kamus sosiologinya (1983) mengartikan integrasi sebagai 1) pengendalian terhadap konflik atau pertentangan, dan 2) membuat suatu keseluruhan (kesatuan) dari unsur-unsur tertentu. Sementara itu, integrasi sosial diartikan sebagai taraf interdependensi (ketergantungan) antarunsur sosio-kultural. Suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur sosial yang saling berbeda untuk menjadi kesatuan di masyarakat.

Dalam konteks yang berbeda, Banton (Sunarto, 2000) mendefinisikan integrasi sosial sebagai pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan (keragaman) ras dalam suatu masyarakat, tetapi tidak memberikan makna penting pada perbedaan tersebut. Perbedaan ras dimaksud menurut Banton juga dapat dimaknai sebagai perbedaan (keragaman) etnik, agama, kelompok, kelas sosial, dan lain sebagainya yang terikat dalam pola hubungan saling ketergantungan secara fungsional. Dengan demikian, Soekanto maupun Banton memaknai integrasi sosial sebagai proses penyatuan atau penyesuaian antara unsur-unsur sosial yang berbeda dan menghasilkan pola yang memiliki taraf ketergantungan atau interdependensi satu sama lain secara fungsional.

Dalam masyarakat Kota Sampit yang multi-etnik, secara praktis, integrasi adalah suatu keadaan dan proses di mana kelompok-kelompok etnik, baik suku, agama, budaya, dan lain sebagainya, beradaptasi dan bersikap konformitas terhadap kebudayaan lain (mayoritas), namun satu sama lain masih tetap mempertahankan kebudayaannya masing-masing. Dalam hal ini, integrasi sosial berperan sebagai pengendali konflik atau pertentangan akibat perbedaan (keragaman) yang ada, dan membangun suatu sistem yang menyatukan masing-masing kelompok pelaku kebudayaan dalam sistem ketergantungan secara fungsional.

David Lockwood menerangkan (Nasikun, 1988) bahwa setiap situasi (kondisi) sosial senantiasa mengandung dua hal, yaitu 1) tata tertib sosial yang bersifat normatif dan 2) substratum yang melahirkan konflik-konflik. Tata tertib yang bersifat normatif ini merupakan manifestasi dari proses penyatuan atau penyesuaian antarunsur sosial (keberagaman) dalam masyarakat. Sementara itu, substratum merupakan bentuk perbedaan, baik dalam hal kepentingan, tujuan, kebutuhan, dan lain sebagainya yang muncul

karena perbedaan dalam struktur yang terbentuk di masyarakat. Oleh sebab itu, struktur sosial juga merupakan bagian yang teramat penting untuk dipahami dalam upaya menelaah dinamika dan integrasi sosial masyarakat Kota Sampit yang multietnik.

Dalam *Kamus Sosiologi* (1983), Soerjono Soekanto mendefinisikan struktur sebagai jalinan daripada unsur-unsur yang pokok. Sedangkan, struktur sosial diartikan sebagai jalinan di antara unsur-unsur (pembentuk) sosial yang pokok. Berbeda dengan stratifikasi sosial yang berarti lapisan-lapisan sosial secara bertingkat, struktur sosial lebih menjelaskan tentang jalinan yang menghubungkan antara unsur sosial yang satu dengan unsur sosial yang lain dalam suatu masyarakat. Meskipun struktur sosial itu sendiri terbentuk dari unsur stratifikasi, selain diferensiasi sosial yang terbentuk di masyarakat. Unsur-unsur sosial pokok dari masyarakat itu sendiri adalah semua bentuk manifestasi dari fungsi, peranan, nilai, status, identitas, dan lain sebagainya yang menjadi asas bagi hubungan antarindividu dalam bermasyarakat.

Integrasi dan struktur sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan di masyarakat. Memahami dinamika dan integrasi sosial yang terbentuk di masyarakat, maka sejatinya juga harus memahami perkembangan dan perubahan struktur sosial yang terbentuk di masyarakat, baik secara ekonomi, politik, kekuasaan, kebudayaan, dan sebagainya. Dengan kata lain, integrasi dan disintegrasi sosial kerap kali juga dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan ekonomi, politik, kekuasaan, kebudayaan, dan sebagainya, yang secara umum terbentuk di masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Oleh sebab itu, membahas struktur sosial, maka sejatinya juga membahas dan memahami stratifikasi dan diferensiasi sosial yang terbentuk di masyarakat Sampit.



Profil Singkat Kabupaten Kotawaringin Timur

1. Sampit sebagai Ibu Kota Kotawaringin Timur

Selain sebagai ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit juga merupakan ibu kota dari Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Salah satu dari dua kecamatan yang menjadi wilayah Kota Sampit saat ini. Kecamatan lainnya yang menjadi wilayah utama dari Kota Sampit adalah Kecamatan Ba'amang.

Seperti pada umumnya, ibu kota kabupaten kota di Kalimantan yang relatif berada di sekitar atau dilewati oleh aliran sungai, Kota Sampit juga dilewati oleh aliran sungai besar, yakni Sungai Mentaya. Sungai Mentaya ini menjadi *trendmark* dan *icon* dari Kota Sampit sebagai Kota Mentaya.

Sungai Mentaya memiliki panjang sekitar 400 km. Namun, hanya 67% atau sekitar 270 km dari sungai ini yang dapat dilalui atau dilayari oleh kapal. Hulu Sungai Mentaya berasal dari dataran

tinggi Pegunungan Muller yang mengalir ke arah selatan dan bermuara langsung ke Laut Jawa di Teluk Sampit. Hingga Kota Sampit yang berjarak sekitar 80 km dari Teluk Sampit, aliran Sungai Mentaya ini juga dapat dimasuki oleh kapal besar yang ukurannya sampai 3.500 DWT (*Deadweight Tonnage*). Sehingga, tidaklah mengherankan jika di Kota Sampit ini sejak lama telah terdapat dua pelabuhan besar, yaitu pelabuhan barang atau yang kerap disebut sebagai Pelabuhan Pelindo dan pelabuhan angkutan penumpang. Bahkan, apabila ditelusuri lebih lanjut, masih ada satu lagi pelabuhan yang secara historis memiliki peranan cukup besar bagi perkembangan Kota Sampit selama ini, yaitu Pelabuhan Oelin atau Ulin. Pelabuhan yang dimaksud itu adalah pelabuhan tua tempat muat kayu-kayu hasil pengolahan pabrik *brensel* peninggalan Belanda, atau yang kemudian pengelolaannya diambilalih oleh Inhutani 3. Lebih lanjut, hal ini akan dibahas dalam uraian berikutnya.

Sebagian aktivitas yang ada di pelabuhan Sampit saat ini, seperti angkutan CPO, kernel sawit, dan semua angkutan hasil dari perkebunan-perkebunan besar di Kotawaringin Timur, telah dipindahkan ke pelabuhan baru di Bagendang Hulu, Mentaya Hilir Utara. Bahkan, diproyeksikan bahwa semua aktivitas bongkar muat yang selama ini dilakukan di pelabuhan barang atau Pelabuhan Pelindo Kota Sampit akan ikut dipindahkan ke Pelabuhan Bagendang tersebut. Sehingga, praktis di Kota Sampit ke depan hanya akan ada pelabuhan angkutan penumpang.

2. Kondisi Geografis Kotawaringin Timur

Secara astronomis, Kabupaten Kotawaringin Timur yang beribu kota Sampit berada di antara $112^{\circ}7'29''$ sampai $113^{\circ}14'22''$ Bujur Timur (BT) dan antara $1^{\circ}11'50''$ sampai $3^{\circ}18'51''$ Lintang Selatan (LS). Sementara itu, secara geografis, letak Kabupaten Kotawaringin Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Katingan di sebelah utara dan timur, dengan Kabupaten Seruyan di sebelah barat dan dengan laut Jawa di sebelah selatan.

Semula, Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki luas wilayah sekitar 50.700 km^2 , yang dilintasi oleh 3 sungai penting, yakni Sungai Mentaya, Seruyan, dan Katingan. Namun, sejak tahun 2002, Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengalami proses pemekaran wilayah menjadi 3 kabupaten, yakni Kabupaten Seruyan, Katingan, dan Kotawaringin Timur. Dengan demikian, Kotawaringin Timur hanya memiliki Sungai Mentaya yang membelah Kota Sampit. Sungai Seruyan dan Katingan masing-masing masuk dalam dua wilayah kabupaten baru tersebut. Sejak saat itu pula, luas Kotawaringin Timur menyusut dan menjadi hanya sekitar 16.796 km^2 .

Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat



Gambar 1. Peta Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini
(Anonim, 2018)

Sebagai kabupaten terluas ketiga atau setara dengan 10,94% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, secara administratif, Kotawaringin Timur terbagi dalam 17 wilayah kecamatan.

No.	Kecamatan	Luas	Presentase
1	Mentaya Hilir Selatan	318 km ²	1,89
2	Teluk Sampit	610 km ²	3,63
3	Pulau Hanaut	620 km ²	3,69
4	Mentawa Baru Ketapang	726 km ²	4,32
5	Seranau	548 km ²	3,26
6	Mentaya Hilir Utara	725 km ²	4,32
7	Kota Besi	1.889 km ²	11,25
8	Telawang	317 km ²	1,89
9	Baamang	639 km ²	3,80
10	Cempaga	1.253 km ²	7,46
11	Cempaga Hulu	1.183 km ²	7,04
12	Parenggean	439,12 km ²	2,94
13	Tualan Hulu	1.090,85 km ²	6,49
14	Mentaya Hulu	1.712,79 km ²	10,20
15	Bukit Santuai	1.636 km ²	9,74
16	Antang Kalang	1.579 km ²	9,40
17	Telaga Alang	1.456,21 km ²	8,67
Jumlah		16.796 km ²	100,00

Tabel 1. Jumlah kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan nama dan luas wilayah hingga tahun 2018 (BPS Kotawaringin Timur tahun 2017)

Dari 17 kecamatan tersebut, luas wilayah Kota Sampit itu sendiri hanya sekitar 1.365 km², atau kurang lebih setara dengan 8,12% dari luas wilayah Kotawaringin Timur. Luas wilayah Kota Sampit yang dimaksud adalah gabungan dari luas Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Baamang sebagai dua kecamatan yang menjadi wilayah utama dari Kota Sampit. Sedangkan, ibu kota kecamatan dengan jarak terjauh dari Kota Sampit adalah Kecamatan Bukit Santuai yang beribu kota di Tumbang Penyahuan. Jaraknya sekitar 207 km.

Dalam bentuk pemerintahan terkecil, Kotawaringin Timur terbagi lagi dalam 168 desa dan 17 kelurahan. Dari jumlah tersebut, sekitar 7 desa dan 10 kelurahan di antaranya berada di wilayah Kota Sampit, yakni 6 desa dan 5 kelurahan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, serta 1 desa dan 5 kelurahan di Kecamatan Baamang.

3. Kondisi Kependudukan

Hingga tahun 2017, Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar atau terbanyak di Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2017 mencapai sekitar 446.094 jiwa, dengan persebaran atau tingkat kepadatan penduduknya mencapai sekitar 26 jiwa per km². Kecamatan dengan kepadatan dan jumlah penduduk tertinggi adalah kecamatan yang terletak di Kota Sampit, yaitu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan Ba'amang. Jumlah penduduk Kecamatan Mentawa Baru Ketapang mencapai 45.058 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 119,61 jiwa per km². Sementara itu, jumlah penduduk Kecamatan Baamang sekitar 59.014 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 92,35 jiwa per km².

Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Teluk Sampit yang hanya mencapai 10.391 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduknya sekitar 17,03 jiwa per km². Tetapi, kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah di Kotawaringin Timur adalah Mentaya Hulu, yang hanya sekitar 7,36 jiwa per km². Hal ini dikarenakan Mentaya Hulu menjadi kecamatan terluas kedua setelah Kota Besi di Kotawaringin Timur, namun

dengan jumlah penduduk terendah ketiga setelah Seranau dan Teluk Sampit, yakni sekitar 12.604 jiwa pada tahun 2017.

No.	Kecamatan	Jumlah	Rasio
1	Mentaya Hilir Selatan	24.190	103,09
2	Teluk Sampit	10.391	107,45
3	Pulau Hanaut	17.994	104,50
4	Mentawa Baru Ketapang	86.839	107,84
5	Seranau	10.819	108,02
6	Mentaya Hilir Utara	17.707	119,47
7	Kota Besi	19.477	106,61
8	Telawang	21.873	126,83
9	Baamang	59.014	104,97
10	Cempaga	26.123	107,06
11	Cempaga Hulu	31.856	116,90
12	Parenggean	29.143	118,58
13	Tualan Hulu	28.795	121,60
14	Mentaya Hulu	12.604	117,61
15	Bukit Santuai	16.258	124,84
16	Antang Kalang	11.961	130,20
17	Telaga Alang	21.050	115,32
	Jumlah	446.094	112,17

Tabel 2. Jumlah dan rasio penduduk per kecamatan di Kotawaringin Timur pada tahun 2017 (BPS Kotawaringin Timur tahun 2018)

Dari 446.094 jiwa penduduk Kotawaringin Timur pada tahun 2017, jumlahnya terbagi ke dalam 117.187 rumah tangga, atau rata-rata sekitar 3,81 jiwa per rumah tangga. Jumlah ini meningkat hampir 2,25% dari 114.608 jumlah rumah tangga pada tahun sebelumnya. Kemudian, jika ditinjau dari usia produktif, sekitar

69,5 % penduduk Kotawaringin Timur merupakan penduduk dengan usia produktif. Sisanya atau sekitar 31,5 % adalah penduduk usia nonproduktif, yaitu yang berusia 0–4 tahun, dan 65 tahun ke atas.

4. Angka Partisipasi dan Sarana Pendidikan

Menurut data Sensus Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017 yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, persentase penduduk berusia 7–24 tahun yang tidak atau belum pernah sekolah sebesar 0,32%. Adapun jika dilihat dari jenis kelamin, angka yang tidak atau belum pernah bersekolah pada usia 7–24 tahun penduduk perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, yaitu sebesar 0,52%. Jumlah ini menunjukkan penduduk perempuan memiliki kecenderungan tidak mengenyam pendidikan lebih besar dibandingkan laki-laki.

Masih menurut hasil survei yang sama, angka tidak bersekolah lagi untuk penduduk laki-laki paling besar terdapat pada kelompok umur 19–24 tahun. Jumlahnya relatif tinggi, yaitu sekitar 74,15%, sedangkan untuk perempuan sebesar 68,77%. Kedua angka ini mengindikasikan bahwa lebih dari 50% jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini tidak melanjutkan pendidikan perguruan tinggi. Pada kasus umum yang lain, masih terdapat sekitar 7,14% penduduk, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum merasakan wajib belajar 9 tahun sesuai dengan program pendidikan secara nasional.

Hal ini rupanya sejalan dengan APM atau Angka Partisipasi Murni dan APK atau Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2017 yang cenderung mengalami

penurunan untuk level pendidikan dasar SD. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, APM SD turun 1,02%. Angka ini menunjukkan bahwa ada kenaikan jumlah anak usia sekolah SD (6–12 tahun) yang tidak mengenyam pendidikan SD.

Untuk jumlah sarana pendidikan wajib belajar sembilan tahun, hingga tahun 2017, telah terdapat 7 sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/SMK), 21 sekolah menengah pertama (SMP), dan 78 sekolah dasar (SD). Penambahan terbesar justru terjadi pada jumlah fasilitas sarana TK (taman kanak-kanak) swasta yang mengalami peningkatan sebanyak 24 sekolah baru. Sedangkan, untuk angka rasio murid dan guru, hampir untuk semua jenjang pendidikan, angkanya terbelang masih rendah. Angkanya berkisar 7–25, atau 1 orang guru menangani 7–25 murid. Adapun untuk pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, hingga saat ini, terdapat 4 SDLB (sekolah dasar luar biasa), dengan jumlah murid 143 orang dan 27 guru. Sayangnya, fasilitas pendidikan ini justru baru tersedia di wilayah perkotaan, tepatnya di Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang.

Demikian halnya dengan fasilitas pendidikan tinggi, telah ada 6 perguruan tinggi swasta yang kesemuanya berada di Kota Sampit. Perguruan tinggi yang dimaksud adalah Universitas Darwan Ali, STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Sampit, STIH (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum) Haringan Hurung Sampit, STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan), Akademi Kebidanan Muhammadiyah, serta Akper atau Akademi Keperawatan Kotawaringin Timur. Kehadiran lembaga-lembaga pendidikan tinggi ini relatif membuat warga Kota Sampit dapat mengenyam pendidikan dengan lebih baik.

5. Ketenagakerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut statistik Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018, persentase pengangguran tertinggi hingga tahun 2017 adalah orang-orang yang belum/tidak tamat SD, yaitu sebanyak 35,32%, lalu disusul mereka yang tamat SMP sebanyak 32,67%. Sementara itu, jumlah pengangguran terendah justru lebih banyak terjadi pada mereka yang telah tamat SMA dan kejuruan.

Terkait status dalam pekerjaan, sebanyak 52,63% penduduk Kotawaringin Timur saat ini bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kotawaringin Timur lebih banyak yang bekerja menjadi buruh dibandingkan pengusaha. Kondisi demikian sepertinya berbanding lurus dengan semakin maraknya perkembangan subsektor perkebunan swasta di Kotawaringin Timur. Mengingat subsektor perkebunan merupakan subsektor unggulan di Kotawaringin Timur. Bahkan, menurut sensus pertanian tahun 2013, diketahui bahwa sebesar 79,58% rumah tangga pertanian di Kotawaringin Timur bekerja di subsektor perkebunan, khususnya subsektor perkebunan-perkebunan besar kepala sawit.

Kotawaringin Timur merupakan kabupaten dengan jumlah areal perkebunan kelapa sawit terbanyak dan terluas di Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlahnya mencapai 36,62% dari total luas areal perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Bahkan, pada tahun 2017, produksi kelapa sawit Kotawaringin Timur mampu menyumbangkan sekitar 57,78% dari total produksi kepala sawit di Kalimantan Tengah, meskipun pada tahun yang sama, produksi kelapa sawit dipengaruhi oleh harga tandan buah segar yang semakin anjlok.

Menurut laporan triwulan kajian ekonomi regional Bank Indonesia triwulan III tahun 2012, selama kurun waktu 5 tahun, mulai tahun 2007 hingga 2011, kecuali tahun 2009, pertumbuhan ekonomi rata-rata Kotawaringin Timur menjadi yang tertinggi dari pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. Tingginya pertumbuhan ekonomi Kotawaringin Timur ini secara berturut-turut ditopang kontribusi angka pertumbuhan pada subsektor perkebunan, subsektor industri, dan jasa perdagangan. Hal ini tentu menunjukkan bahwa subsektor perkebunan, subsektor industri, dan jasa perdagangan telah mengalami pertumbuhan yang signifikan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Bahkan, pertumbuhan PDRB Kotawaringin Timur pada tahun 2011, jumlahnya meningkat 2 kali lipat dari PDRB tahun 2007. Sementara itu, pendapatan per kapitanya meningkat 1,5 kali lipat dari tahun yang sama.

Pada tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi pada pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kotawaringin Timur atas dasar harga berlaku mencapai sekitar 7,99%. Angka laju pertumbuhan ekonomi ini meningkat dari 7,93% dan 7,66% pada tahun 2016 dan 2015 sebelumnya. Selain tetap menjadi yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah, pertumbuhan ekonomi ini juga sangat signifikan apabila melihat besaran nilai PDRB atas harga berlaku yang terbentuk. Besaran nilai PDRB Kotawaringin Timur atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 mencapai sekitar 22,43 triliun. Bandingkan dengan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 yang hanya mencapai 9,25 triliun dan menjadi yang tertinggi di Kalimantan Tengah saat itu. Tidak heran jika Kotawaringin Timur menjadi salah satu penggerak ekonomi provinsi Kalimantan Tengah hingga saat ini.



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**



Sampit dan Dinamika Perkembangannya

1. Asal Usul dan Perkembangan Awal Sampit

Sampit sebenarnya hanya sebuah istilah sederhana yang menunjuk pada pengertian nama suatu daerah atau wilayah tertentu di Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, nama ini ternyata mengandung cukup banyak perdebatan secara etimologis (asal usul suatu kata) bagi sebagian masyarakat penduduknya. Khususnya, karena nama ini berhubungan dengan asal usul dan sejarah suatu wilayah, yang kemudian atau saat ini menjadi ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bagi sebagian pemerhati Kota Sampit, sejarawan, penulis lokal, dan orang-orang tua dahulu, nama Sampit dipercaya berasal dari dua kata dalam bahasa Tiongkok, yaitu *sam* dan *it* atau angka 3 dan 1. Kata *sam* dan *it* atau angka 3 dan 1 ini secara etimologi kemudian diartikan sebagai 31 (jumlah) orang Tionghoa yang

diduga pertama kali datang dan merambah ke wilayah ini (Sampit). Sehingga, wilayah ini dinamakan Sampit, dari pelafalan lokal atau pengucapan sehari-hari kata *sam it*.

Akan tetapi, jika ditelusuri kembali dalam kosakata bahasa suku-suku besar bangsa Tionghoa yang pernah datang atau berada di Indonesia, angka 3 (tiga) dan 1 (satu) ini sendiri ternyata ditulis dalam kata yang berbeda. Dalam bahasa *Hokkien* atau *Hokian*, misalnya, angka 3 dan 1 itu ditulis dengan kata *sā* dan *it*, dalam bahasa *Tio Ciu* ditulis dengan kata *sā* dan *cēk*, lalu dalam bahasa *Hakka* ditulis dengan kata *sām* dan *jit*. Sementara itu, dalam bahasa Mandarin, angka 3 dan 1 ditulis dengan kata *sān* dan *yī*.² Perbedaan tulisan ejaan kata ini tentu mengindikasikan bahwa kata Sampit memang bukan berasal dari bahasa-bahasa suku besar di Tiongkok dimaksud, yaitu angka 3 dan 1.

Terlepas benar atau salah hal tersebut, kedatangan 31 orang Tionghoa ke wilayah ini dipercaya oleh sebagian mereka karena perdagangan dengan orang-orang lokal di Kalimantan pada zaman dahulu. Namun, sebagian lagi dipercaya sebagai pelarian orang-orang Tionghoa Mongol yang lari akibat serangan oleh Raden Wijaya dalam kasus ekspedisi Ku Bilai Khan ke tanah Jawa abad XIII. Mereka yang percaya bahwa kedatangan 31 orang Tionghoa karena urusan perdagangan meyakini bahwa wilayah sekitar Sampit pada masa lalu memang memiliki komoditas perdagangan yang menarik perhatian bangsa-bangsa asing, meskipun tidak pernah juga dapat diceritakan atau diketahui secara pasti mengenai komoditas yang dimaksud. Tetapi, ada pula yang percaya bahwa kedatangan 31 orang Tionghoa adalah orang-

² Setidaknya, dalam bahasa suku-suku besar bangsa Tionghoa yang datang ke Indonesia ternyata tidak ada satu pun yang tepat menerangkan kata *sam it* sebagai 31, kecuali jika itu perpaduan antara kata *sām* dalam bahasa *Hokkien* dan kata *it* dalam bahasa *Hakka*.

orang Mongol yang melarikan diri dari Raden Wijaya. Mereka juga tidak pernah mengakui atau mengatakan bahwa orang atau masyarakat yang pertama kali mendiami Sampit itu sebenarnya adalah orang-orang Tionghoa.

Selain itu, ada juga kelompok yang justru berbeda sama sekali dengan kedua pendapat tersebut. Kelompok ini percaya bahwa Sampit berasal dari istilah (bahasa) lokal yang karena kekunoannya saat ini sudah tidak diketahui artinya secara etimologi. Kepercayaan ini diperkuat dengan terdapatnya Kerajaan Sampit Kuno yang letaknya dipercaya sekitar 30 km ke arah selatan dari Kota Sampit saat ini. Dalam kitab *Negarakertagama* yang ditulis oleh Mpu Prapanca, selain Kotawaringin dan beberapa wilayah lainnya di Kalimantan (Tanjungpura), nama Sampit juga disebut-sebut sebagai daerah kerajaan atau bagian dari kerajaan yang pernah menjalin hubungan dan menjadi daerah vasal Majapahit pada pertengahan abad XIV (Mulyana, 2006).³

Sebagai sebuah nama wilayah atau daerah kerajaan, Sampit memang telah dikenal jauh sejak zaman kejayaan Majapahit. Bahkan, dalam beberapa catatan dan publikasi lokal, wilayah ini kerap dikenal dan diidentifikasi sebagai salah satu daerah permukiman tertua di Kotawaringin. Namun, daerah Sampit yang dimaksud ini, seperti yang telah disebutkan sebelumnya dan diceritakan sebagian tetua-tetua mereka, dipastikan bukan berada pada wilayah Kota Sampit yang menjadi ibu kota Kotawaringin Timur saat ini. Selain memang hampir-hampir tidak pernah ditemukan artefak-artefak peninggalan kerajaan tua di Kota Sampit, dan cerita-cerita sejarah orang tua masa lalu bahwa letak Kerajaan

³ Vasal adalah seseorang atas nama daerah atau kerajaan yang menjalin hubungan dengan penguasa atau kerajaan besar lainnya dalam bentuk dukungan atau pemberian upeti dan akan menerima jaminan atau imbalan sebagai gantinya.

sampit berada di sekitar Belambit, sejarah perkembangan Kota Sampit selanjutnya juga menguatkan pendapat tersebut.

Secara geografis, letak Kota Sampit dilalui atau dibelah menjadi dua dataran oleh aliran sungai besar bernama Sungai Mentaya. Panjang Sungai Mentaya ini kira-kira 400 km, dengan hulunya yang berasal dari dataran tinggi Pegunungan Muller dan Schwaner, yang mengalir dari utara menuju dataran rendah di selatan hingga bermuara ke Laut Jawa. Aliran Sungai Mentaya ini merupakan satu-satunya akses atau jalur transportasi yang menghubungkan Kota Sampit dengan beberapa daerah atau wilayah lainnya pada masa lalu. Terutama dengan laut Jawa melalui Teluk Sampit, Ujung Pandaran sebagai pintu masuk jalur-jalur perdagangan ke wilayah Sampit pada masa lalu. Termasuk Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Sebab, akses jalan darat yang menghubungkan antarkedua wilayah tersebut baru mulai dibangun sekitar tahun 1970 hingga 1980-an. Dalam fungsinya sebagai akses jalur transportasi utama, Sungai Mentaya memiliki peran yang penting dan strategis bagi perkembangan Kota Sampit selanjutnya hingga seperti saat ini.

Walaupun secara geografis aliran Sungai Mentaya tepat membelah Kota Sampit menjadi 2 wilayah daratan, yaitu sebelah barat dan timur, namun perkembangan di antara keduanya tidaklah sama. Struktur pengembangan kota lebih banyak terjadi pada bagian wilayah sebelah barat dibanding dengan timur. Pusat-pusat aktivitas, baik itu kantor pemerintahan, pasar, pemukiman penduduk, dan sebagainya lebih banyak berkembang di wilayah bagian barat atau kiri sungai. Sedangkan, pada bagian wilayah sebelah timur atau sebelah kanan sungai, praktis hanya ada beberapa pemukiman dengan sedikit fasilitas pendukungnya. Hal ini dikarenakan pengembangan dan perkembangan Sampit sejak

dahulu memang selalu berpusat atau berada pada bagian wilayah sebelah barat sungai, bahkan jauh sebelum akses jalan-jalan darat mulai ada atau dibangun untuk menghubungkan antara Sampit dengan beberapa wilayah lainnya di Kalimantan Tengah.

Menariknya, perkembangan wilayah yang memang lebih banyak berpusat pada bagian wilayah sebelah barat sungai ini lagi-lagi ternyata dipercaya berhubungan dengan keberadaan masyarakat Tionghoa. Menurut anggapan beberapa informan yang diperoleh melalui cerita-cerita orang tua pada masa lalu, pemukiman yang dibangun membelakangi matahari terbit dianggap tidak atau kurang baik.⁴

Sungai sebagai akses utama pada masa lalu tentu menjadi beranda depan bagi pemukiman masyarakat. Sehingga, ketika pemukiman dibangun di sebelah timur dan menjadikan Sungai Mentaya sebagai beranda depan, maka posisinya akan membelakangi matahari terbit. Kondisi demikian ini yang dianggap tidak baik atau kurang menguntungkan bagi sebuah pemukiman. Oleh sebab itu, perkembangan wilayah atau pemukiman kemudian lebih banyak terjadi pada bagian wilayah sebelah barat Sungai Mentaya, atau menghadap ke arah timur. Sekalipun daerah yang dipercaya sebagai pemukiman awal atau kampung asal masyarakat Sampit justru berada di bagian wilayah sebelah timur atau sebelah kanan Sungai Mentaya. Wilayah kampung asal yang dimaksud ini oleh mereka sering kali disebut sebagai *Benua Usang*, kampung lama, atau Mentaya Seberang.

⁴ Meskipun tidak menjelaskan lebih lanjut, namun hampir semua informan yang dihubungi oleh penulis, termasuk tulisan-tulisan tentang sejarah Sampit, mengutarakan hal seperti ini.

Tentunya, menjadi tidak penting cerita-cerita seperti asal usul nama Sampit dari angka 3 dan 1, serta kurang baiknya pemukiman yang membelakangi matahari menjadi pengetahuan umum masyarakat tentang sejarah Sampit. Sebab, yang jauh lebih penting adalah cerita-cerita ini sejatinya justru telah menandakan adanya pola interaksi yang cukup intensif antara masyarakat lokal dengan para pendatang dari Tiongkok sejak masa lalu.

Pengembangan wilayah Sampit sebenarnya sudah mulai terjadi sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Terutama sekali ketika pelabuhan Sampit mulai dibuka pada paruh kedua abad XIX, yang menandai adanya aktivitas-aktivitas perdagangan komoditas lokal saat itu.

Namun, secara administratif, pengembangan wilayah Sampit baru terjadi setelah pemerintah Belanda mengeluarkan *Staatsblad* Nomor 178 Tahun 1898 yang mengatur tentang pembentukan *Afdeeling* Sampit yang terdiri atas Distrik Sampit, Distrik Pembuang, dan Distrik Mendawai. Tetapi, pada tahun 1913, *Afdeeling* Sampit ini direstrukturisasi kembali secara administratif hanya menjadi 2 *Onderafdeeling*, yaitu Sampit dan Kotawaringin.⁵ Bertepatan dengan masa ini, komoditas-komoditas perdagangan, seperti karet, gambir, dan kelapa sawit, mulai dikembangkan secara masif melalui pola-pola perkebunan besar.

2. Bruynzeel dan Perubahan Status Kepemilikannya

Perkembangan Sampit selanjutnya tentu tidak akan pernah lepas dari pengaruh keberadaan *Bruynzeel Dayak Houtbedrijven*

⁵ Dikutip dari *Sejarah Pegatan Katingan Kuala; Kajian Historis dan Dinamika Transisi Kepemimpinan Mendawai, Kotim, dan Kataingan* pada <http://nazryalsyahrin.blogspot.com>.

NV, atau yang dikenal masyarakat Sampit saat ini sebagai brensel. Sebuah pabrik pengolahan kayu terbesar pada masanya yang dibangun oleh Belanda pada paruh kedua tahun 1947 di lokasi sekitar Pelabuhan Oelin Sampit, Sungai Mentaya.⁶ Sebuah pelabuhan tua yang sekiranya dimaksud adalah sama, maka ini dibangun oleh Belanda sebagai pelabuhan perdagangan bersamaan dengan 16 pelabuhan lainnya di Jawa dan 2 di Sumatra pada tahun 1859 (Zuhdi dkk, 2016: 22)⁷

Pada masa awal-awal berdirinya pabrik sepertinya memang lebih banyak dikerjakan langsung oleh para pekerja Hindia Belanda. Terutama dalam mengoperasikan jalannya mesin-mesin penggergajian kayu yang kerap disebut para informan sebagai yang paling bear dan modern pada masanya. Sebab, pada areal sekitar lokasi pabrik brensel, terdapat sisa-sisa peninggalan berupa bangunan dalam areal kawasan yang menggambarkan adanya zonasi atau pembagian wilayah pemukiman bagi para pekerja.⁸ Ada pemukiman khusus bagi para pekerja, dan ada juga pemukiman khusus bagi mereka yang berada di jajaran manajemen; terutama apabila dilihat dari bentuk bangunan-bangunan pemukimannya.

Sementara itu, sisa-sisa peninggalan berupa rangka besar pabrik yang beberapa masih kokoh berdiri hingga saat ini, panjangnya rel-rel kereta pengangkut kayu yang hingga tahun 80-an masih banyak terlihat dan diingat oleh masyarakat, serta dua lokomotif yang dikirim oleh *Dedemsvaartsche Stoomtramweg* dari Belanda

⁶ Bertepatan dengan berakhirnya perusahaan trem (kereta) uap jarak jauh di Belanda, *Dedemsvaartsche Stoomtramweg* yang dua lokomotifnya kemudian dikirim ke Sampit-Borneo untuk melayani pengangkutan kayu, dikutip dari <https://www.nvbs.com> dan <https://issuu.com>.

⁷ Diperkirakan bahwa lokasi pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan Oelin.

⁸ Pemukiman para pekerja tentu ditujukan untuk para pekerja dari Belanda, bukan para pekerja lokal setempat yang sekiranya saat itu memang sudah terlibat menjadi pekerja, tentu mereka telah memiliki rumah tinggal masing-masing.

pada awal berdirinya pabrik tahun 1947, telah menggambarkan betapa besar, megah, dan modernnya pabrik tersebut pada saat itu. Tidak heran jika dalam cerita-cerita yang masih diingat oleh mereka, *Bruynzeel* atau yang kerap dikenal dengan brensel hingga saat ini diakui sebagai pabrik kayu terbesar di Asia Tenggara pada masanya.



Gambar 2. Kantor Inhutan III yang masih berdiri kokoh hingga saat ini
(Dokumentasi lapangan oleh tim, 2018)

Seiring dengan peralihan dan perpindahan aset pemerintah Hindia Belanda ke pemerintah Republik Indonesia, maka sejak tahun 1955, pabrik kayu brensel ini kemudian diambil alih kepemilikannya oleh Indonesia. Sejak saat itu pula, nama *Bruynzeel Dayak Houtbedrijven NV* berubah menjadi PT Sampit Dajak. Sebuah nama yang menegaskan bahwa keberadaannya itu di Kota Sampit, dan identitas penduduk lokal aslinya adalah Dajak atau Dayak.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Tertentu kepada Perusahaan Kehutanan Negara, maka per tanggal 1 April 1963, PT Sampit Dajak kembali berubah namanya menjadi Perusahaan Negara Perhutani di bawah BPU Perhutani.

Lalu, apa hubungannya antara PT Sampit Dajak atau brensel dengan Perusahaan Kehutanan Negara atau Perhutani? Mengapa pabrik pengolahan kayu hasil hutan dapat berubah menjadi perusahaan negara yang tugas dan wewenangnya justru menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan, dan perlindungan hutan?

Dalam konteks perubahan ini, tentu tidak bisa dilihat semata dari keberadaan brensel atau pabrik pengolahan kayu hasil hutannya tersebut, melainkan juga kawasan yang selama ini menjadi areal pengusahaan hasil kayu-kayu hutannya. Dengan jumlah dan kapasitas produksi yang begitu besar, maka areal pengusahaan hutannya pun tentu sangat luas. Sehingga, tugas dan wewenangnya berkembang tidak semata pada peran pengusahaan hutan, melainkan juga aspek perencanaan, pengurusan, dan perlindungan kawasan hutan; termasuk kawasan-kawasan hutan yang menjadi areal dari pengusahaannya selama itu.

Namun, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1974 yang ditindaklanjuti dengan akta notaris Fatimah, S.H., No. 1/1977 tertanggal 3 Januari 1977 yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 24 Mei 1977, Perhutani mengalami perubahan kembali dan statusnya menjadi Persero. Menjadi BUMN Kehutanan yang dikenal hingga saat ini dengan nama PT Inhutani III.⁹

⁹ Disarikan dari <http://bumn.go.id>.

Berbeda dengan Perhutani, sesuai dengan bentuknya, maka Inhutani lebih beorientasi pada laba atau keuntungan. Perubahan ini tentu telah menandai kembali babak berikutnya dari peran brensel di Kota Sampit.

Bruynzeel atau brensel yang menunjuk pada pengertian aktivitas pabrik dan eksploitasi-eksploitasi hasil hutannya secara tidak langsung memang cukup berpengaruh terhadap perkembangan Kota Sampit. Terutama ketika status dan kepemilikannya berubah menjadi PT Sampit Dajak, lalu Perhutani, dan terakhir menjadi PT Inhutani III. Besarnya pengaruh *bruynzeel* atau brensel dapat dilihat dari peran eksploitasi dan industri kehutanannya yang berubah dari Perusahaan Negara Perhutani menjadi PT Inhutani III.

Peralihan bentuk usaha dari Perum Perhutani yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat (negara), kepada Inhutani yang berbentuk perseroan ini, tentu telah menggambarkan sisi kepentingan pemerintah Indonesia saat itu.¹⁰ Salah satunya adalah orientasi pengembangan badan-badan usaha negara (BUMN) sektor kehutanan dan sisi untuk mengejar perolehan laba atau keuntungan (*profit motive*) secara ekonomi. Sehingga, dalam kurun waktu 1970 hingga 1990-an, Inhutani III telah mengalami perkembangan yang pesat dan signifikan, baik dari sisi profit atau keuntungan yang diperoleh negara maupun sisi pengembangan aktivitas-aktivitasnya yang ada. Karena dalam statusnya sebagai persero, maka inti dari kegiatan pengelolaan sektor kehutanan yang dilakukan Inhutani III memang semata berorientasi pada bisnis utamanya, yaitu penghasil kayu.

¹⁰ Semenjak tahun 2014, Inhutani I-V bergabung dan menjadi anak perusahaan Perhutani yang kemudian menjadi *holding* BUMN bidang kehutanan.

Kondisi demikian tentu sangat berdampak terhadap peningkatan aktivitas-aktivitas industri di bagian hilir, yaitu pabrik-pabrik pengolahan kayu hasil dari hutannya, termasuk peningkatan aktivitas-aktivitas produksi pabrik *Bruynzeel* di Sampit. Dengan luasnya sumber daya hutan Kalimantan Tengah yang dikuasai dan dikelola saat itu, bahkan seorang mantan pejabat Inhutani berani menyebut hingga angka 95% dari luas areal yang ada. Maka, kondisi demikian ini tentu telah berdampak terhadap meningkatnya keterlibatan masyarakat lokal setempat, terutama dalam kegiatan eksploitasi dan industri-industri dari pengolahan kayu-kayu hasil hutannya.

3. Maraknya Industri Pengolahan Kayu Hasil Hutan

Selain Inhutani III, melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1979 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan, peran eksploitasi dan industri kehutanan kemudian berkembang melalui sistem hak penguasaan hutan yang diberikan kepada pihak swasta, termasuk yang ada di Kalimantan Tengah atau Kotawaringin Timur pada saat itu. Meskipun dalam praktiknya, beberapa perusahaan swasta ternyata justru sudah melakukan kegiatan perusahaan dan eksploitasi melalui pabrik-pabrik pengolahan kayu hasil hutannya jauh sebelum peraturan itu keluar.

Demikian halnya dengan sistem hak penguasaan hutan (HPH), ini tentu semakin menandai berkembangnya industri-industri kehutanan yang ada. Walaupun dalam gilirannya juga memunculkan persoalan-persoalan baru yang lain, yakni konflik-konflik perebutan penguasaan sumber daya hutan dan praktik-

praktik penebangan hutan secara destruktif. Konflik-konflik itu tentu tidak harus selamanya ditandai oleh adanya pertentangan secara fisik. Namun, juga ditandai dengan adanya praktik-praktik penebangan liar, baik yang dikarenakan perebutan pengusahaan sumber-sumber daya hutan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah maupun motif keuntungan lebih yang ingin diperoleh dari peluang yang ada.

Salah satu hal yang menandai kondisi tersebut di Kalimantan Tengah, khususnya di Kotawaringin Timur, adalah maraknya industri-industri atau pabrik pengolahan kayu hasil hutan yang berdiri di sepanjang aliran-aliran Sungai Mentaya dan anak-anak sungainya yang ada; baik industri atau pabrik-pabrik pengolahan kayu pemilik konsesi areal hak pengusahaan hutan maupun pabrik-pabrik tanpa kepemilikan areal HPH berupa *bandsaw-bandsaw* kecil atau *sawmill*. Sebagian *bandsaw* kecil atau *sawmill* mini ini adalah mereka yang menampung kayu-kayu ilegal dari luar perusahaan, atau dari para penebang yang melakukan *tebang banji*. Istilah lokal yang artinya kurang lebih adalah menebang untuk diri sendiri, tidak digaji perusahaan, atau menebang untuk dijual langsung. Selanjutnya, melalui *bandsaw-bandsaw* atau *sawmill* ini, mereka mengurus dokumen-dokumen untuk mengeluarkan hasil kayu olahan tersebut. Meskipun tidak sedikit juga pabrik-pabrik besar pengolahan kayu pemilik HPH ini kerap melakukan hal yang sama seperti halnya pabrik-pabrik kecil itu.

Salah seorang mantan pekerja *Bruynzeel Dayak Houtbedrijven* atau Inhutani III pada masa lalu berinisial M.A. menuturkan, pada masa ia mulai bekerja di *log pond* atau tempat penampungan kayu milik Inhutani III tahun 1972, saat itu ternyata sudah mulai ada pabrik-pabrik pengolahan kayu di Kotawaringin Timur. Lokasi *log pond* itu berada di sekitar muara Sungai Pemuatan, cabang

dari Sungai Mentaya di sekitar lokasi pabrik brensel. Dua tahun setelah ia mulai bekerja atau sekitar pertengahan tahun 1974, ia pindah ke *sawmill* atau tempat penggergajian kayu seiring dengan semakin mulai maraknya *bandsaw* atau *sawmill-sawmill* yang berdiri saat itu.

Dari penuturan singkat M.A. tersebut, tercermin bahwa selain *Bruynzeel* atau brensel milik Inhutani III, pada saat yang sama atau sekitar awal dekade 1970-an, juga mulai banyak berdiri *sawmill-sawmill* dan *bandsaw* di sekitar Kota Sampit atau Kotawaringin Timur.¹¹ Tepatnya, di sepanjang Sungai Mentaya yang membelah wilayah Kota Sampit dan membentang dari Ujung Pandaran, Samuda, hingga Parenggean.¹²

Memang, hampir tidak pernah ada data pasti yang menggambarkan jumlah *sawmill-sawmill* dan *bandsaw* yang mulai berdiri saat itu. Namun, mudahnya para informan mengingat kembali dan menjelaskan keberadaan *sawmill-sawmill* atau *bandsaw* pada masa itu, baik yang besar maupun kecil, telah memberikan sedikit gambaran tentang maraknya industri pengolahan kayu saat itu dan pada tahun-tahun selanjutnya.¹³

Sebut saja PT Kayu Mas yang menurut beberapa informan sudah mulai berdiri dan beraktivitas sejak awal-awal dekade 1970-an. Bahkan, ada juga informan yang menyebut sebelum itu, yaitu pada akhir dekade 1960-an. Tetapi, pada awal-awal keberadaannya, perusahaan ini belum mengusahakan hasil kayu

¹¹ *Sawmill* adalah tempat penggergajian kayu, sedangkan *bandsaw* ialah jenis mesin penggergajian kayu yang mata gergajinya berbentuk pita. *Bandsaw* terdiri atas 2 jenis, yaitu manual dan otomatis. Lambat laun, penyebutan *bandsaw* juga mengartikan tempat atau pabrik pengolahan kayu yang lebih besar daripada *swamill*.

¹² Jarak Kota Sampit dengan Samuda sekitar 30 km, sedangkan jarak dari Kota Sampit ke Parenggean sekitar 100 km.

¹³ Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang, bahkan secara terbuka menyebutkan bahwa lebih dari 120 perusahaan HPH telah beroperasi di Kalteng sejak tahun 1970, dikutip dari <https://internasional.kompas.com>.

hutan untuk dipasarkan, melainkan mengusahakan kulit-kulit kayu sebagai bahan baku pembuatan obat nyamuk bakar. Setelah beberapa tahun kemudian, sekitar paruh pertama tahun 1970-an, barulah mereka mengusahakan hasil kayu hutan. Meskipun lokasi pabriknya berada di Tanjung Lesung, tetapi kantor manajemennya berada di Kota Sampit.

Keberadaan PT Kayu Mas dan pabriknya ini ternyata masih cukup kuat dikenal dalam ingatan masyarakat Sampit hingga saat ini. Selain karena dianggap sebagai salah satu yang memiliki mesin-mesin penggergajian atau pengolahan kayu paling modern dan terbesar di antara pabrik-pabrik pengolahan kayu milik swasta lainnya, berdirinya PT Kayu Mas juga menandai mulai semakin ramainya aktivitas-aktivitas di Kota Sampit saat itu.



Gambar 3. Gudang Inhutani III yang berada tepat di samping alun-alun Kota Sampit (Dokumentasi lapangan oleh tim, 2018)

Selain itu, meskipun memang tidak secara berurutan dalam tahun-tahun awal pendiriannya, masyarakat juga mengenal Belambit, yang merujuk pada pabrik pengolahan kayu hutan yang berada di daerah Belambit. Ada pula Firma Hasan, Mentaya Kalang, Dewata, Karya Sejati, dan Tanjung Katung yang merujuk pada PT Meranti Mustika Plywood yang berdiri tahun 1975. Ada juga Aji Baya yang merujuk pada pabrik milik Haji Ubaya yang menurut seorang informan menjadi terbesar kedua setelah PT Kayu Mas. Ada pula Surya Sejati, Yusmin, Gudang Bahtera, yang merujuk pada pabrik besar di daerah Parenggean yang bangunan gudangnya hampir menyamai dengan milik Bruynzell Inhutani, serta Kriya Bersama yang letaknya berada di dekat Bandara H. Asan Sampit saat ini. Pabrik-pabrik ini sebagian besar merupakan pabrik-pabrik pengolahan kayu swasta yang mulai berdiri sejak tahun 1970 hingga 1980-an di sekitar aliran Sungai Mentaya, dengan kapasitas produksi dan keterlibatan jumlah pekerja yang relatif besar. Sebab, sebagian besar dari pabrik-pabrik pengolahan kayu ini memang menjadi bagian dari industri hilir konsesi hak-hak pengusahaan hutan yang juga mulai marak berdiri saat itu.

Selain pabrik-pabrik besar pengolahan kayu hasil hutan tersebut, ada juga *bandsaw* dan *sawmil-sawmil mini* yang berdiri di sepanjang Sungai Mentaya dari arah Samuda hingga Parenggean dengan jumlahnya yang bisa mencapai puluhan, bahkan mungkin ratusan, baik yang berdiri dengan atau tanpa kepemilikan areal konsesi hutan. Jika melihat nama-nama pemiliknya yang beberapa juga kerap disebut oleh para informan, maka sebagian dari keberadaan *bandsaw* atau *sawmill-sawmill mini* ini merupakan bagian dari keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas-aktivitas pengusahaan hutan ketika itu.



Gambar 4. Contoh *bandsaw* yang berada di Museum Kayu Kota Sampit saat ini (Dokumentasi lapangan oleh tim, 2018)

Tetapi, yang tetap menjadi ironis adalah di belakang sebagian nama pemilik usaha *bandsaw* atau *sawmill-sawmill* ini, ternyata ada pengusaha-pengusaha besar dari luar Kota Sampit, baik dari Jakarta ataupun daerah lainnya yang terlibat sebagai sponsor utama atau penyandang dana¹⁴, yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Terlibat secara langsung bermakna sejak awal pendirian, mendapatkan bahan baku, hingga proses produksi dan pengiriman barang ke luar Sampit, semuanya didukung oleh pengusaha-pengusaha besar dari luar daerah. Pengusaha lokal cukup menyediakan lahan dan proses-proses perizinan di

¹⁴ Mereka menyebutnya sebagai pengusaha-pengusaha Tiongkok dari Jakarta.

tingkat lokal.¹⁵ Sedangkan, terlibat secara tidak langsung berarti pengusaha cukup menyediakan dana awal untuk mendapatkan bahan baku dan proses-proses produksi. Setelah semua proses hingga menjadi bahan jadi dan melunasi semua biaya yang disepakati di awal, maka proses pengiriman dan penjualan menjadi tanggung jawab pihak pemesan atau pengusaha dari luar daerah tersebut.

Hal yang menarik dari keterlibatan secara tidak langsung pengusaha-pengusaha dari luar daerah Sampit tersebut adalah adanya pola hubungan yang lebih banyak didasarkan pada kepercayaan semata atau saling percaya di antara mereka. Sepintas hubungan seperti ini memang tidak lazim dalam dunia bisnis. Sebab, itu menyangkut hubungan kerja dan modal usaha yang tentu tidak sedikit. Tetapi, potensi besarnya keuntungan yang diperoleh satu sama lain, tingkat mobilitas, waktu yang seakan berjalan begitu cepat, serta tingkat kompetisi pengusaha-pengusaha luar untuk dapat mengakses para pelaku usaha kayu di tingkat lokal membuat hal seperti ini menjadi lazim atau biasa terjadi.

Seorang informan yang pernah menjadi pelaku usaha bidang pelayaran jasa transportasi laut pada masa itu bahkan memberikan informasi yang menguatkan tentang gambaran kondisi saat itu. Ia menuturkan bahwa peredaran uang tunai (*cash money*) di Sampit sangatlah besar, terutama karena transaksi-transaksi langsung yang terjadi dalam aktivitas-aktivitas *bandsaw* atau *sawmill-sawmill* mini di sepanjang Sungai Mentaya.

¹⁵ Sebagian istilah perizinan ini hanyalah kamuflase dari keterlibatan oknum-oknum tertentu. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa *kau* yang keluar dari areal pabrik jumlahnya bisa 2 kali lipat dari *sako* yang dikeluarkan.

Begitu besarnya peredaran uang tunai pada masa itu menjadi hal yang lazim atau biasa jika kita melihat orang membawa uang tunai dalam jumlah nilai yang sangat besar hanya dalam sebuah tas atau kantong plastik biasa. Dalam urusan-urusan tertentu, banyak dari mereka mungkin sepertinya sudah tidak lagi memikirkan cara membawa uang tunai secara aman, atau menggunakan jasa lembaga-lembaga keuangan. Selain karena saat itu Sampit memang relatif aman, mobilitas yang tinggi juga membuat mereka relatif hanya memikirkan cara transaksi segera dapat dilakukan, baik yang terkait uang tunai dalam proses pembayaran DP (*down payment*) kayu, biaya proses pengurusan izin keluar kayu, proses untuk pelunasan barang, proses muat di lokasi-lokasi tertentu, maupun biaya pengiriman.

Ada dua simpulan yang dapat ditarik dari gambaran kondisi tersebut saat itu. *Pertama*, mobilitas dan peredaran uang tunai yang begitu tinggi membuat faktor kepercayaan dan keamanan modal usaha tidak lagi menjadi perhatian yang penting. *Kedua*, begitu besarnya kontribusi dan peran *bandsaw* atau *sawmill-sawmill* mini yang begitu banyak berdiri terhadap peredaran uang tunai (*cash money*) di masyarakat, yang membuat distribusi dan efek ekonominya ke masyarakat juga relatif jauh lebih besar, meskipun tentunya juga tidak bisa menafikan peran dan kontribusi dari keberadaan pabrik-pabrik besar lainnya. Pada gilirannya, Sampit dalam perannya sebagai pusat aktivitas dan pemerintahan, kemudian menjadi semakin marak dengan berkembangnya efek berganda kegiatan-kegiatan ekonomi dan perdagangan.



Industri Kehutanan dan Pengaruhnya terhadap Sampit

Selain maraknya peredaran uang tunai atau *cash money* di masyarakat, dampak paling nyata dari industri-industri kehutanan di Kotawaringin Timur saat itu adalah tingginya serapan angka tenaga kerja, baik sektor formal maupun informal. Termasuk geliat perkembangan fisik wilayah dan aktivitas-aktivitasnya yang terjadi secara agregat sebagai efek atau pengaruh berganda (*multiplier effect*) dari maraknya industri-industri kehutanan tersebut. Khususnya, di Kota Sampit dalam perannya sebagai pusat pemerintahan, pusat ekonomi, perdagangan, hiburan, dan lain sebagainya.

Dalam konteks pengertian itu, pembahasan selanjutnya lebih ditekankan pada upaya untuk mengurai kondisi sosial yang terbentuk di Kota Sampit pada masa-masa awal kehadiran hingga maraknya perkembangan industri-industri kehutanan.

1. Masa-Masa Awal Bruynzeel hingga 1960-an



Gambar 5. Rangka utama pabrik Bruynzeel yang masih ada hingga saat ini
(Dokumentasi lapangan oleh tim, 2018)

Keberadaan pabrik Bruynzeel beserta aktivitas-aktivitasnya yang terjadi pada masa lalu memang seperti mencerminkan awal-awal dari keberadaan Kota Sampit itu sendiri. Kota kecil yang berkat sumber daya hutannya menjadi berkembang hingga seperti ini, karena hampir semua aktivitas bersama pada masa lalu di Kota Sampit memang relatif berpusat pada kegiatan-kegiatan Bruynzeel. Suara mesin, kepulan asap pabrik, hingga lalu-lalang para pekerja dan keluar masuknya kayu mengiringi memori kesibukan pabrik pengolahan kayu yang konon dianggap terbesar di Asia selama 24 jam penuh pada masa itu. Suara sirine yang terdengar hingga seantero Sampit 3 kali dalam sehari menandai adanya kesibukan pergantian *sift* para pekerja yang telah terjadwal secara ketat dan disiplin.

Adapun aktivitas loko kereta atau trem uap pada jalur rel-rel yang panjangnya hingga mencapai belasan, bahkan puluhan km mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan sampai lokasi *log pond* menjadi bagian dari sisi kesibukan yang lain dari Kota Sampit saat itu. Termasuk para pekerja yang sibuk mengatur kayu-kayu log agar presisi dan mudah diangkut secara otomatis ke dalam mesin-mesin pabrik, hingga mereka yang memang bertugas mengumpulkan dan membuang bagian kayu yang tidak terpakai hasil dari sisa-sisa pembuangan pabrik.



Gambar 6. Rangka cerobong asap pabrik Bruynzeel
(Dokumentasi lapangan oleh tim, 2018)

Pada bagian lain, kesibukan yang sama juga terjadi di bibir Sungai Mentaya, lokasi yang menjadi tempat merapatnya kapal-kapal *tongkang* pengangkut kayu. Puluhan bahkan ratusan pekerja sibuk mengatur dan menyusun muatan secara bergantian di pelabuhan yang kemudian dikenal namanya sebagai Pelabuhan Oelin (Ulin).¹⁶ Keluar masuk dan hilir mudiknya kapal-kapal penarik *tongkang* pengangkut kayu merupakan gambaran dari aktivitas kesibukan di Sungai Mentaya saat itu, terutama ketika aktivitas perusahaan hutan dan industri-industri pengolahan kayu hasil hutannya tidak lagi hanya dilakukan oleh Bruynzeel atau Inhutani III.

Segegap aktivitas yang terjadi pada Bruynzeel pada gilirannya telah menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap perkembangan Kota Sampit, termasuk polarisasinya terhadap aktivitas-aktivitas sosial ekonomi masyarakat lokal sekitar pabrik. Sebagai contoh, aktivitas-aktivitas ekonomi pasar yang tidak lagi semata terjadi di pusat-pusat pasar. Hal ini ditandai dengan berkembangnya aktivitas jual beli di lokasi-lokasi sekitar pemukiman para pekerja pabrik dan Pelabuhan Oelin tempat muatnya hasil kayu olahan pabrik. Lokasi yang kemudian berkembang menjadi pasar keramat saat ini. Lalu, berkembangnya industri hiburan film yang ditandai dengan berdirinya dua gedung bioskop modern, yaitu Bioskop Sentosa dan Sanghai. Termasuk berkembangnya geliat kehidupan malam yang ditandai oleh keberadaan para penjaja kebutuhan biologis dan lain sebagainya.

Keberadaan Bruynzeel atau brensel dengan segegap aktivitas dan efek berganda yang ditimbulkannya pada masa lalu secara tidak langsung juga telah menandakan bahwa dalam awal-awal

¹⁶ Istilah *oelin* atau ulin ini sendiri disematkan oleh masyarakat karena pelabuhan ini terbuat dari kayu-kayu jenis ulin yang tahan terhadap lembap dan air hingga bertahun-tahun.

perkembangannya, Sampit seperti mengarah pada kota industri. Meskipun dalam suatu kawasan yang terbatas, dan dalam struktur masyarakat yang juga masih sangat sederhana.

Selain ditunjukkan oleh geliat kesibukan aktivitas sebagian besar anggota masyarakatnya, kawasan Bruynzeel juga merupakan wilayah terintegrasi yang menggabungkan antara zona kawasan pabrik, pemukiman para pekerja, pelabuhan, dan zona-zona kawasan lain sebagai pendukung aktivitasnya.



Gambar 7. Rangka pabrik Bruynzeel lainnya yang tersisa hingga saat ini
(Dokumentasi lapangan oleh tim, 2018)

Memang tidak pernah ada data yang menunjukkan persentase jumlah penduduk Kota Sampit yang bekerja atau terlibat dalam aktivitas-aktivitas Bruynzeel saat itu. Namun, menurut penuturan dari beberapa informan, jumlahnya terbilang sangat besar

untuk ukuran saat itu. Setidaknya, ini ditunjukkan oleh luasnya kawasan secara keseluruhan, besarnya areal bangunan pabrik, dan beragamnya jenis-jenis aktivitas pekerjaan yang ada.

Jika dilihat dari rangka pabrik yang tersisa saat ini saja, luas bangunannya kira-kira bisa menempati areal sekitar $50 \times 100 \text{ m}^2$. Belum lagi jalur re-rel lori atau trem uap yang menurut ingatan para informan, panjangnya bisa mencapai 13–20 km ke areal rimba atau hutan. Termasuk luas areal hutan tebangan kayunya, *log pond* tempat penampungan sementara kayu-kayu *log*-nya, gudang-gudang penampungan hasil kayu olahannya, jumlah *tongkang* atau kapal-kapal penariknya yang oleh beberapa informan juga disebutkan jumlahnya mencapai 7 (tujuh) buah kapal, dan lain sebagainya. Hal ini tentu sementara menggambarkan asumsi jumlah pekerja atau orang yang terlibat, sekaligus tingginya aktivitas-aktivitas yang terjadi di Bruynzeel saat itu.



Gambar 8. Areal perumahan khusus pimpinan atau *top management* pabrik (Dokumentasi lapangan oleh tim, 2018)

Wilayah terintegrasi ditunjukkan oleh adanya blok-blok pemukiman para karyawan, kantor, dan fasilitas-fasilitas pendukung lain yang berada dalam satu kawasan dengan areal pabrik. Terdapat dua areal pemukiman peninggalan Belanda yang memang sengaja dibangun sebelumnya untuk para karyawan atau pekerja di sekitar pabrik. *Pertama*, blok pemukiman khusus para pekerja atau yang dikenal masyarakat sekitar saat ini sebagai kamar 20. *Kedua*, areal pemukiman khusus para pimpinan atau *top management* yang letaknya berada tepat di depan kawasan pabrik. Tetapi, tidak semua karyawan kelas pekerja Bruynzeel menempati blok areal pemukiman khusus para pekerja. Selain jumlah rumah dari pemukimannya yang memang terbatas, kedua areal pemukiman khusus ini juga merupakan peninggalan bangunan Belanda pada masa sebelumnya.



Gambar 9. Areal perumahan khusus para pekerja/buruh pabrik
(Dokumentasi lapangan oleh tim, 2018)

Dengan ungkapan lain, selain sebagai kota perdagangan, pada masa awal-awal perkembangannya, Sampit ternyata juga menampilkan wajahnya yang berbeda, yaitu sebagai pusat industri. Terutama ketika kondisi ini juga didukung oleh keberadaan dua pabrik lainnya sebagai peninggalan dari masa Belanda yang saat itu masih kokoh berdiri, yaitu pabrik pengolahan sawit dan pabrik karet. Pabrik pengolahan sawit ini memang sudah berdiri jauh sebelum berdirinya Bruynzeel. Karena pabrik sawit ini merupakan bagian dari pengembangan komoditas-komoditas tertentu dalam skala perkebunan, selain gambir dan karet, pada masa awal Sampit mulai dikenal oleh orang-orang Eropa.¹⁷ Tetapi, aktivitas-aktivitasnya masih tidak sebesar Bruynzeel, dan keberadaannya juga justru mulai meredup, bahkan hilang sama sekali seiring dengan perkembangan kota dan semakin maraknya industri-industri kehutanan saat itu.

Adapun keberadaan pabrik karet, atau yang kerap dikenal dengan *remilling*, meskipun aktivitasnya tidak lagi sebesar pada masa itu, namun eksistensinya masih tetap ada hingga saat ini. Bedanya, saat ini, mereka tidak lagi mengusahakan jenis tanaman karet ini dalam skala-skala perkebunan. Mereka hanya menerima atau menampung penjualan dari masyarakat yang selama ini memang telah mengusahakan dalam skala kecil atau skala perkebunan rumah tangga.

¹⁷ Sepanjang jalan S. Parman di Kota Sampit itu sebelumnya merupakan areal perkebunan sawit. Namun, areal perkebunan itu mulai hilang seiring dengan perkembangan dan perluasan pembangunan Kota Sampit.



Gambar 10. Pabrik karet/*remilling* yang masih kokoh berdiri
(Dokumentasi lapangan oleh tim, 2018)

Gambaran kondisi sosial masyarakat Sampit pada masa dua dekade dari awal-awal pengoperasian pabrik Bruynzeel memang sudah terlihat cukup dinamis. Aktivitas-aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat relatif sudah mulai berkembang, walaupun masih terpusat atau berada dalam pengaruh aktivitas-aktivitas industri, terutama pengolahan kayu Bruynzeel. Meskipun, sebelum itu, sudah ada perkebunan-perkebunan sawit, karet, dan lain sebagainya dalam skala yang tidak terlalu besar beserta pabrik-pabrik pengolahannya.

Demikian halnya dengan struktur sosial masyarakat yang terbentuk. Walaupun sudah mulai mengarah kepada perkembangan yang lebih kompleks, terutama dengan hadirnya para pendatang, namun itu masih tetap dalam perubahan yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Masyarakat lokal, terutama Banjar dan Dayak (Ngaju), masih tetap mendominasi.

Kehadiran para pendatang dari Jawa dan Madura juga masih tidak signifikan menambah keberadaan jumlah mereka yang memang telah ada jauh sejak awal-awal pengembangan perkebunan, terutama gambir dan karet, sekitar tahun 1900-an (Yusri Dharmadi, 2016: 49). Sebab, pada saat yang sama, migrasi juga dilakukan oleh penduduk lokal dari wilayah-wilayah sekitar seiring dengan mulai berkembangnya Kota Sampit. Adapun kelompok minoritas lainnya, yaitu Tionghoa, masih tetap dalam jumlah dan perannya yang berkuat pada sektor perdagangan dan usaha-usaha jasa lainnya.

Struktur masyarakat Sampit saat itu relatif masih sangat sederhana. Integrasi sosial masih terbangun dengan cukup baik melalui fungsi dan peran-peran sosial kelompok serta individu-individu tertentu di masyarakat. Selain komoditas-komoditas perdagangan, mobilitas keluar masuknya orang ke wilayah Sampit juga masih sangat minim. Sebab, satu-satunya akses masuk ke Sampit saat itu hanya melalui jalur sungai, yaitu Sungai Mentaya. Termasuk akses dari dan ke Kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah ketika itu.

Balai Pelestarian Nilai Budaya 2. Era Industri Kehutanan; Emas Hijau di Sampit Kalimantan Barat

Dinamika perkembangan kota Sampit selanjutnya dimulai sekitar awal dekade tahun 1970-an, terutama ketika salah satu perusahaan kehutanan swasta besar di Sampit atau PT KM mulai mendirikan pabrik pengolahan kayu hasil hutan di Tanjung Lesung sekitar muara Sungai Mentaya, namun justru berkantor di Sampit. Perusahaan ini sebenarnya sudah mulai ada atau beroperasi sejak akhir dekade 1960-an. Tetapi, aktivitasnya

semula hanya mengusahakan kulit kayu pohon tertentu sebagai bahan baku obat nyamuk bakar, atau yang dikenal masyarakat Sampit sebagai *gembor*. Sebab, lokasi yang kemudian menjadi kantor utama dari perusahaan tersebut di Sampit, sebelumnya merupakan bangunan gudang penampungan bahan baku kulit-kulit kayu tersebut. Namun, lambat laun, seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas pabrik Bruynzeel di Sampit, perusahaan ini juga mulai mengembangkan bentuk usahanya pada jenis pengolahan kayu-kayu hasil hutan.

Beroperasinya aktivitas pabrik pengolahan kayu PT KM di Tanjung Lesung ini juga mulai menandai semakin maraknya kehadiran para pendatang dari luar-luar daerah di Kota Sampit, termasuk para pendatang dari Jawa dan Madura. Itu tidak hanya terkait keberadaan kantor PT KM dan aktivitas-aktivitas Bruynzeel yang telah ada sebelumnya. Sebab, pada saat yang sama, PT MMP yang berlokasi di Tanjung Katung, Mentaya Seberang, atau sekitar 20 menit jaraknya ke arah timur juga mulai mengoperasikan aktivitasnya sebagai salah satu pabrik pengolahan kayu terbesar di Kotawaringin Timur saat itu.

Kondisi Kota Sampit semakin mulai menunjukkan geliatnya sebagai pusat aktivitas ketika industri-industri pengolahan kayu hasil hutan mulai banyak bermunculan di Kotawaringin Timur, baik yang besar maupun yang kecil. Kondisi yang pada gilirannya mendorong arus urbanisasi atau hadirnya para pendatang ke Kota Sampit.

Memang hampir-hampir tidak pernah ada data yang dapat menjelaskan secara rinci atau gamblang tentang kondisi yang terjadi saat itu. Tetapi, masa emas dari industri-industri kehutanan yang ditandai dengan banyak berdirinya pabrik pengolahan kayu

oleh perusahaan besar swasta itu lebih banyak terjadi dalam kurun waktu 1970-an hingga 1990-an.

Pabrik pengolahan kayu berupa *sawmill-sawmill* mini, termasuk kasus-kasus pembalakan liar atau *illegal logging*, relatif baru mulai marak terjadi pada tahun 1990-an sampai pertengahan 2000. Tulisan ini tentu tidak akan membahas tahapan masa perkembangan eksploitasi hutan dan usaha-usaha pengolahan kayunya yang terjadi di Kotawaringin Timur. Namun, lebih menitikberatkan pada dampak yang ditimbulkannya secara sosial dan ekonomi di Kota Sampit.

Dampak paling nyata dari perkembangan industri dan pengolahan kayu hasil hutan tentu adalah tingginya serapan angka tenaga kerja, baik sektor formal maupun informal, lokal maupun dari luar wilayah. Tenaga kerja formal lebih banyak terserap pada infrastruktur industri dan fasilitas-fasilitas pendukung lain. Sedangkan, tenaga kerja sektor informal relatif lebih banyak terserap atau berkembang, karena efek berganda yang ditimbulkan dari adanya aktivitas-aktivitas pengusaha hutan dan industri pabrik pengolahan kayu hasil hutannya tersebut.

Meskipun aktivitas-aktivitas pengusaha dan pengolahan kayu hasil hutan ini lebih banyak terjadi di luar wilayah Sampit, tetapi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan perdagangan, Kota Sampit juga memperoleh dampak yang signifikan dari perkembangan industri-industri kehutanan tersebut. Khususnya, yang berhubungan dengan sektor jasa keuangan, jasa angkutan, administrasi, perkantoran, perdagangan, hiburan, dan lain sebagainya. Pada saat yang sama, Bruynzeel juga sedang mengembangkan ekspansi kegiatan-kegiatannya seiring dengan peralihan bentuk usahanya menjadi persero atau Inhutani III.

Dalam hal serapan angka tenaga kerja, misalnya, puluhan perusahaan HPH, puluhan, atau bahkan ratusan pabrik pengolahan kayu, baik yang kecil maupun besar, termasuk Bruynzeel atau Inhutani III, hingga perusahaan-perusahaan lain yang mendukung, seperti jasa angkutan kapal, keuangan, administrasi, dan lain sebagainya, tentu membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Tidak saja tenaga kerja lokal, namun juga masyarakat dari luar Sampit atau para pendatang.

Pada gilirannya, kegiatan-kegiatan ekonomi di Kota Sampit juga semakin berkembang. Hal ini tentu belum termasuk angka tenaga kerja pada sektor-sektor informal yang juga tumbuh dan berkembang seiring dengan geliat perkembangan Kota Sampit sebagai pusat aktivitas atau ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur saat itu.

Pasar tradisional beserta aktivitas-aktivitasnya yang terjadi mungkin menjadi salah satu indikator paling nyata atau tampak dari adanya geliat perkembangan ekonomi suatu wilayah. Karena berkembangnya aktivitas-aktivitas di pasar secara umum juga menunjukkan adanya geliat aktivitas-aktivitas ekonomi yang terjadi di suatu wilayah, termasuk wilayah Kota Sampit ketika itu.

Jauh sebelum saat itu, sebenarnya sudah ada dua lokasi pasar yang telah lama berdiri di Kota Sampit, yaitu pasar lama, atau yang saat ini dikenal sebagai pasar besar, dan pasar keramat. Pasar lama atau pasar besar ini berada sekitar 500 m ke arah selatan atau arah hilir dari pelabuhan penumpang atau yang saat ini dikenal dengan nama Pelabuhan Sampit. Sedangkan, pasar keramat berada di sekitar Pelabuhan Oelin (Ulin), lokasi tempat muat kayu-kayu olahan Bruynzeel ke kapal pada masa lalu. Lokasi pasar ini juga dekat dengan pemukiman pekerja Bruynzeel atau kamar 20. Saat ini, lokasinya beberapa puluh meter ke arah utara

atau arah hulu dari pelabuhan angkutan barang, atau yang dikenal dengan nama Pelabuhan Pelindo. Kedua pasar ini memang berada tepat di sekitar bibir Sungai Mentaya. Sebab, pada awal-awal berdirinya pasar ini memang memanfaatkan transportasi Sungai Mentaya sebagai satu-satunya jalur angkutan distribusi barang dari dan ke luar pasar.

Memang tidak ada satu pun informasi yang mampu menjelaskan secara pasti kapan pasar keramat dan pasar lama atau pasar besar ini mulai berdiri. Namun, penuturan seorang informan, bahwa saat ia lulus sekolah rakyat tahun 1963, masih banyak orang Belanda yang terlihat berbelanja di pasar lama. Informasi ini tentu menunjukkan bahwa pasar lama memang sudah ada atau berdiri jauh sebelum saat itu. Dalam perkiraan informan, pasar lama berdiri sekitar tahun 1950-an. Orang-orang Belanda yang dimaksud itu adalah tenaga-tenaga kerja Eropa yang masih ada atau diperbantukan ketika Bruynzeel Dayak *Houtbedrijven* NV sudah berubah menjadi Perhutani.

Penyebutan istilah “lama” pada pasar ini lebih karena untuk memisahkan adanya pengembangan pasar baru yang dibangun dalam areal kawasan yang sama setelah itu. Lokasi bangunan pasar dimaksud tetap berada pada satu areal kawasan pasar, berada sejajar di bagian sebelah utara atau arah hulu dari bangunan pasar lama tersebut.

Pengembangan pasar lama ini tentu menjadi bagian dari geliat perkembangan ekonomi yang terjadi akibat berkembangnya industri-industri pengolahan kayu hasil hutan di sekitar Kota Sampit atau Kotawaringin Timur saat itu. Sebelum adanya pengembangan wilayah pasar, tepat pada bagian sisi barat, sudah mulai banyak berdiri bangunan lain secara mandiri, terutama

toko-toko kelontong, gudang, tempat hiburan, bahkan fasilitas perkantoran swasta dan lain sebagainya. Demikian seterusnya.

Meskipun di kawasan pasar itu kerap terjadi kebakaran, padahal sebagian besar struktur bangunannya pada masa lalu terbuat dari kayu dan mudah terbakar, kawasan pasar ini tetap berkembang menjadi pusat perdagangan, baik siang maupun malam hari. Sehingga, kawasan ini lebih familier disebut oleh masyarakat Sampit sebagai pasar besar. Termasuk adanya pengembangan pusat perbelanjaan Mentaya awal dekade 2000-an yang kerap diakui oleh masyarakat Sampit sebagai pusat perbelanjaan terlengkap dan terbesar di Kalimantan Tengah saat itu. Meskipun, pusat perbelanjaan ini dibangun justru ketika industri-industri kehutanan mulai berkurang dan berganti dengan era perkebunan-perkebunan besar kelapa sawit.

Demikian halnya pasar keramat, disebut keramat karena lokasinya memang tepat berada di sekitar makam tua keramat dan lebih dekat dengan Pelabuhan Oelin. Konon, makam ini adalah makam salah seorang tokoh tua Sampit yang hidup pada awal-awal berkembangnya wilayah ini sebagai pemukiman penduduk. Berbeda dengan pasar lama atau pasar besar yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan fasilitas perdagangan lainnya, pasar keramat ini justru lebih banyak menjual langsung barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pasar keramat ini relatif berkembang secara mandiri karena lokasinya yang sejak dahulu memang berada dalam satu areal dengan kawasan pemukiman para pekerja Bruynzeel dan Pelabuhan Oelin. Sehingga, dalam perkembangannya, pasar ini senantiasa berada di sekitar atau dikelilingi oleh pemukiman-pemukiman penduduk. Bahkan, di bagian dalam pasar ini juga ada pemukiman penduduk.

Selain pasar beserta aktivitas-aktivitasnya, sekaligus sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan ekonomi lainnya, geliat perkembangan Sampit juga ditunjukkan dengan berkembangnya fasilitas-fasilitas jasa perbankan. Hampir semua jenis fasilitas dan kantor perbankan, baik itu bank pemerintah maupun swasta, dalam peran dan fungsinya yang menunjang geliat perkembangan ekonomi saat itu juga mulai mendirikan perwakilannya di Kota Sampit, baik kantor cabang, kantor unit, maupun kantor cabang pembantu. Bahkan, termasuk Bank Indonesia atau Bank Central yang kemudian mendirikan Kantor Cabang Bank Indonesia perwakilan Banjarmasin di Kota Sampit pada 15 Desember 1982.¹⁸ Itu berhubungan dengan fungsi dan kewenangannya untuk mengatur, mengawasi, dan menjaga kelancaran sistem pembayaran atau transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan melalui perbankan.

Meskipun Kantor Cabang Bank Indonesia yang telah berdiri megah tepat di Jl. Ahmad Yani, Kota Sampit, tersebut saat ini sudah tidak lagi beroperasi, namun keberadaannya pada masa lalu tentu sudah cukup menggambarkan kondisi perkembangan ekonomi Kotawaringin Timur saat itu. Terlebih itu justru terjadi pada dekade 1980-an ketika secara umum kondisi ekonomi bangsa Indonesia belum semaju seperti saat ini. Sebab, selain daerah-daerah yang menjadi ibu kota Provinsi di Kalimantan, maka hanya Balikpapan yang memiliki kantor Bank Indonesia saat itu hingga sekarang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan Kota Sampit sebagai dampak dari maraknya industri-industri kehutanan yang terjadi di Kotawaringin Timur juga menandai perkembangan

¹⁸ Kantor Bank Indonesia Perwakilan Palangkaraya berdiri sepuluh tahun kemudian, atau pada 11 Agustus 1992.

struktur masyarakatnya. Secara umum, struktur sosial masyarakat di Kota Sampit tentu telah mengalami perkembangan yang semakin kompleks. Seiring dengan perkembangan dan bertambahnya jumlah penduduk, maka diferensiasi sosial tentu tidak lagi hanya terbagi atas identitas suku bangsa, agama, gender, daerah asal, dan kelompok-kelompok besar lainnya. Namun, juga terbagi atas kelompok-kelompok kecil, seperti pekerjaan, profesi, jabatan, hobi, status kelompok, kepentingan, kelompok-kelompok kegiatan, dan sebagainya. Sehingga, aktivitas-aktivitas kota menjadi begitu sangat kompleks. Sebab, dalam kurun waktu yang sama dengan perubahan-perubahan dan perkembangan yang terjadi, Sampit juga mulai semakin mengukuhkan statusnya sebagai kota perdagangan. Terutama karena hanya Pelabuhan Sampit dan Kumai (di Kotawaringin Barat) yang saat itu dapat diakses oleh kapal-kapal besar barang dan penumpang di Kalimantan Tengah.

Salah satu yang mungkin paling menarik untuk bisa menggambarkan kondisi Sampit ketika itu adalah geliat dari aktivitas-aktivitas pasarnya yang terjadi pada malam hari. Hal ini sebagaimana yang digambarkan oleh Andri WP dalam artikelnya yang berjudul “Dampak Perubahan Fungsi Kawasan dan Pola-Pola Adaptasi Masyarakatnya di Kotawaringin Timur” (Handep, 2017: 7).

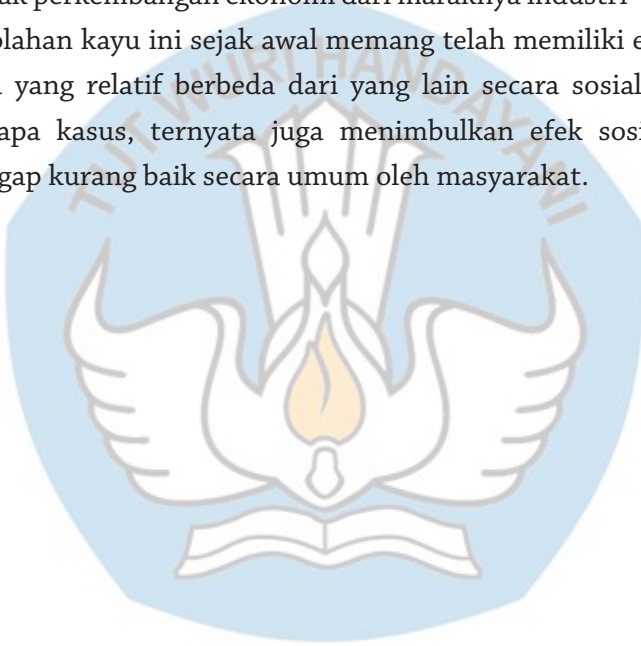
...Aktivitas pusat-pusat pertokoan dan pasar tradisional di Kota Sampit saat itu ternyata begitu hidup. Terutama karena aktivitas-aktivitasnya pada malam hari, saat para pekerja kayu hutan dari luar daerah, atau yang berasal dari daerah-daerah sekitar mulai menghabiskan waktu setengah malamnya untuk mengganti kepenatan suasana kerja. Menikmati sajian kuliner atau berbelanja barang kebutuhan selama di hutan-hutan.

Lambat laun, tidak hanya para pekerja dari hutan, masyarakat yang memang tidak terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas di hutan pun juga turut meramaikan kehidupan pasar pada malam hari. Sehingga, aktivitas-aktivitas pasar menjadi berkembang. Tidak hanya menyediakan kuliner, namun juga menyediakan barang-barang kebutuhan yang lain, seperti sandang dan fasilitas-fasilitas hiburan....

Sesuatu yang coba digambarkan tersebut merupakan bagian dari aktivitas-aktivitas rutin sehari-hari yang ada atau terjadi di Kota Sampit. Perannya sebagai pusat pasar sekaligus hiburan membuat aktivitas-aktivitas di pasar Sampit menjadi ikut berkembang seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat. Sehingga, kesibukan di pasar tidak lagi hanya berupa aktivitas-aktivitas formal pada siang hari, melainkan juga berkembang pada bentuk aktivitas malam hari mengikuti ritme kegiatan, waktu, dan kebutuhan para pengunjungnya. Bahkan, hingga pada bentuk kegiatan-kegiatan lain, seperti yang diutarakan oleh Andri WP (Handep, 2017: 7).

...Silih berganti para pengunjung warung tenda adalah bagian dari rutinitas yang dihadapi mereka setiap malam. Menurut informasi yang diperoleh, beberapa dari mereka ternyata ada yang bersedia menemani para pelanggan setelah pasar malam menghentikan aktivitasnya. Sebuah fenomena sosial yang secara sosiologis memang lazim terjadi di daerah-daerah tertentu yang menerima dampak dari maraknya transaksi peredaran uang hasil pengusaha kayu-kayu hutan saat itu. Utamanya mereka, para pelanggan kelas pekerja yang mayoritas memang berasal dari luar-luar daerah. Meskipun, tidak sedikit juga yang berasal dari daerah-daerah sekitar....

Gambaran tersebut ternyata mirip dengan yang terjadi pada masa-masa awal dari pengoperasian Bruynzeel oleh Indonesia di lokasi sekitar pemukiman para pekerja atau kamar 20. Artinya, dampak perkembangan ekonomi dari maraknya industri-industri pengolahan kayu ini sejak awal memang telah memiliki efek berganda yang relatif berbeda dari yang lain secara sosial. Dalam beberapa kasus, ternyata juga menimbulkan efek sosial yang dianggap kurang baik secara umum oleh masyarakat.



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**



Struktur dan Integrasi Sosial Masyarakat Kota Sampit

Memahami dinamika perkembangan Sampit dan aspek-aspek yang mempengaruhinya tentu merupakan upaya awal untuk mengetahui dan memahami kondisi-kondisi sosial masyarakat Kota Sampit pada masa lalu. Setidaknya, melalui industri-industri kehutanan yang telah mempengaruhi perkembangan Kota Sampit hingga saat ini. Meskipun demikian, memahami dinamika dan integrasi sosial masyarakat Sampit tentu tidak cukup hanya dengan mengulas perkembangan wilayah sebagai sebuah entitas masyarakat dan aspek-aspek yang mempengaruhinya. Sebab, untuk memahami dinamika integrasi masyarakat, kita juga harus memahami struktur dan dinamika yang mempengaruhi pola hubungan antarunsur sosial yang terjadi di masyarakat. Salah satu unsur sosial yang dimaksud adalah kelompok sosial dan pola pelembagaannya.

1. Struktur Masyarakat Sampit sebelum 67

Seperti yang telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya, struktur masyarakat Sampit pada masa-masa awal pengambilalihan dan pengoperasian Bruynzeel oleh Indonesia memang masih begitu sederhana. Selain jumlah penduduknya yang relatif sangat minim, komposisinya berdasarkan etnik secara umum juga masih sangat sederhana, yang terdiri atas masyarakat lokal, Tionghoa, dan pendatang lainnya. Pengelompokan sederhana ini tentu tidak ingin menegaskan bahwa pada masyarakat lokal juga masih terdiri atas Dayak dan Banjar. Sedangkan, masyarakat pendatang terdiri atas Jawa, Madura, Bugis, dan lainnya.

Selain karena sudah kuatnya pengaruh Banjar terhadap masyarakat lokal yang ditandai dengan aspek penggunaan bahasa dan dialeknya dalam komunikasi sehari-hari, identifikasi kelompok pendatang pada masa itu juga belum mengarah pada identitas etnik yang lebih kecil. Sehingga, etnik Banjar masuk dalam kategori masyarakat lokal, dan pendatang masih menyatu dalam penyebutan kelompok yang sama. Adapun Tionghoa, selain jauh sebelum itu mereka sudah ditempatkan berbeda oleh Hindia Belanda, perannya dalam struktur ekonomi lokal selama masa itu juga telah menempatkan dirinya pada struktur atau kelompok yang relatif berbeda dengan yang lain.

Secara umum, struktur penguasaan ekonomi pada masa itu memang relatif dikuasai oleh masyarakat Tionghoa. Utamanya, dalam hal perdagangan dan distribusi barang kebutuhan pokok, usaha-usaha di bidang perkebunan dan pengolahannya, pengumpul atau pengepul komoditas hasil hutan, dan kebun yang diusahakan oleh masyarakat, serta usaha-usaha perdagangan kecil

di pasar dan lain sebagainya. Begitu besarnya peran Tionghoa saat itu dan sebelumnya, hingga pengaruh keberadaannya juga cukup kuat untuk menjadi alasan bagi anggapan terbentuknya suatu wilayah dan asal usulnya oleh masyarakat di Kota Sampit. Bahkan, sampai akhirnya menjadi pengetahuan kolektif bagi sebagian masyarakatnya.

Sebagai contohnya adalah kepercayaan tentang baik atau tidaknya pemukiman itu dibangun membelakangi matahari terbit yang kemudian menjadi alasan mengapa struktur Kota Sampit itu lebih banyak berkembang di wilayah Barat dibandingkan timur dari Sungai Mentaya. Sebab, jika dibangun pada bagian timur atau sebelah kanan dari Sungai Mantaya, maka dianggap akan membelakangi matahari terbit. Pemukiman-pemukiman saat itu memang sengaja dibangun menghadap arah sungai sebagai akses utama.

Demikian pula dengan kepercayaan tentang asal usul (kata) Sampit yang secara etimologi dihubungkan dengan kedatangan 31 orang-orang Tionghoa ke wilayah ini. Bukan pada alasan siapa dan mengapa mereka ini datang ke wilayah Sampit, tetapi angka 31 yang dipercaya oleh sebagian mereka jika diucapkan dalam bahasa Tiongkok menjadi kata *sam* dan *it*, atau *sam-it*.

Lalu, bagaimana dengan masyarakat lokal, yaitu Dayak dan Banjar?

Sebagai masyarakat lokal di Sampit, Dayak dan Banjar tidak dapat dipisahkan, kecuali dengan Dayak yang berada jauh di wilayah-wilayah pedalaman Kotawaringin Timur. Hal itu dikarenakan perkawinan campur yang sudah kerap terjadi di antara mereka, penggunaan bahasa Banjar dan dialeknya dalam komunikasi sehari-hari, serta agama dan kultur keagamaannya

yang sudah relatif sama, yaitu Islam. Sehingga, di antara mereka kerap kali tidak bisa dibedakan antara satu sama lain saat itu.

Dalam struktur ekonomi, sebagian Banjar, terutama orang-orang yang datang dalam periode terakhir, juga banyak yang berperan sebagai pedagang di pasar-pasar, distributor bahan pangan ke wilayah-wilayah kampung, pengumpul hasil kebun dan hutan, serta lain sebagainya. Sebagian lainnya, sebagaimana Dayak, mereka juga ada yang menjadi peladang, pekebun karet, nelayan, penambang emas, buruh pelabuhan, pekerja pabrik, pegawai, dan pejabat dalam struktur pemerintahan lokal. Keberadaan mereka mendominasi hampir di setiap jenis aktivitas usaha dan pekerjaan, kecuali perdagangan-perdagangan besar yang memang dominan dikuasai oleh Tiongkok ataupun orang-orang Tionghoa.



Gambar 11. PT Sampit, pengolahan karet/remiling
(Dokumentasi lapangan oleh tim, 2018)

Para pendatang, terutama yang berasal dari Jawa dan Madura, lebih banyak yang terserap dalam pekerjaan-pekerjaan sektor industri dan perkebunan, seperti Bruynzeel, sawit, dan karet. Karena keberadaan mereka secara umum masih sedikit, terutama di Sampit, maka perannya juga belum signifikan. Termasuk juga pada sektor-sektor informal yang saat itu jumlahnya masih belum signifikan. Tetapi, dalam jajaran manajemen Bruynzeel dan pemerintahan daerah saat itu, terutama Jawa, jumlahnya cukup signifikan.

Pada masa-masa setelah pengambilalihan dan pengembangan aktivitas-aktivitas Bruynzeel, misalnya, jajaran *top management* perusahaan ini lebih banyak diisi oleh orang-orang dari Jawa.¹⁹ Keberadaan mereka selanjutnya juga terdapat dalam struktur pemerintahan, aparat kepolisian, dan tentara. Kondisi demikian ini terus berlanjut hingga datangnya era pengusaha hutan yang begitu marak terjadi di Kalimantan Tengah, terutama Kotawaringin Timur.

2. Struktur Masyarakat pada Era Industri Kehutanan

Berbeda dengan dua dekade pada masa-masa awal pengoperasian Bruynzeel oleh Indonesia, pada masa ini, struktur masyarakat Kota Sampit telah mengalami suatu perkembangan yang cukup berarti, baik dari sisi bentuk, komposisi, maupun keragaman dari unsur-unsurnya yang ada. Utamanya, dengan mulai berkembang atau bertambahnya jumlah penduduk, jenis usaha, pekerjaan atau

¹⁹ Menurut keterangan informan, untuk jajaran manajemen Bruynzeel hingga menjadi Inhutani, Bruynzeel hanya mau menerima lulusan dari Jawa. Kondisi itu berlaku hingga pertengahan tahun 1990-an.

profesi-profesi, hingga status sosial dan hadirnya para pendatang seiring dengan semakin berkembangnya Kota Sampit.

Jika dilihat dari keragaman kelompok besar etnik, perubahan-perubahan tersebut relatif masih tidak berbeda dari kondisi-kondisi Kota Sampit sebelumnya. Sebab, memang hampir tidak ada identitas kelompok lain yang menjadi pendatang dominan, selain mereka yang memang sejak awal telah ada dan mendiami Kota Sampit. Perubahan-perubahan yang berarti justru terjadi pada komposisi jumlah penduduk berdasarkan kelompok etnik yang telah ada sebelumnya.

Masyarakat Madura dan Jawa, misalnya, dalam kurun waktu awal 1970-an hingga akhir 1990-an, ternyata cukup banyak yang mulai berdatangan ke Kota Sampit. Meskipun masyarakat lokal Dayak, khususnya yang berasal dari wilayah-wilayah sekitar beserta kelompok masyarakat yang lain, banyak juga yang mulai melakukan migrasi-migrasi ke wilayah Kota Sampit. Utamanya, sejak berkembangnya industri kehutanan dan pengolahan kayu-kayu hasil hutannya di wilayah-wilayah sekitar Sampit atau Kotawaringin Timur secara umum.

Pada masa ini, kedatangan masyarakat Jawa dan Madura, sebagaimana yang lain, semula lebih banyak terserap dalam sektor-sektor industri kehutanan dan bentuk aktivitas-aktivitas lain yang mendukung. Terutama ketika mulai berkembangnya pabrik-pabrik pengolahan kayu hasil hutan, baik besar maupun kecil, di sepanjang aliran Sungai Mentaya, Kotawaringin Timur. Namun, seiring berkembangnya Sampit sebagai pusat aktivitas yang menerima dampak langsung dari berkembangnya industri-industri kehutanan di sekitar wilayahnya, banyak juga yang terserap atau bahkan secara mandiri mengembangkan usaha-usaha di sektor informal.

Demikian halnya dengan masyarakat Dayak yang berasal dari wilayah-wilayah sekitar Sampit atau Kotawaringin Timur. Seiring dengan perkembangan struktur perkotaan, berkembangnya sektor jasa dan keuangan, serta semakin terbukanya peluang dalam struktur pemerintahan dan lain sebagainya, mereka melakukan migrasi ke Kota Sampit. Berbeda dengan pendatang dari Jawa dan Madura atau lainnya, banyak dari masyarakat Dayak justru relatif terserap dalam jenis-jenis pekerjaan sektor-sektor formal dan pegawai negeri ketimbang sektor-sektor informal.

Menurut statistik penduduk Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 (Yusri, 2016: 26), persentase jumlah penduduk Jawa dan Madura di Kabupaten Kotawaringin Timur sekitar 18,8% dan 7%. Besarnya persentase jumlah penduduk Jawa di Kotawaringin Timur ini menjadi terbesar kedua setelah Dayak, bahkan jumlahnya hingga mencapai 2 kali lipat dari jumlah penduduk Madura saat itu. Hal ini tentu wajar, karena menjelang akhir dekade 1990-an, di Kotawaringin Timur mulai muncul perusahaan-perusahaan besar perkebunan kelapa sawit, seiring dengan mulai berakhir atau berkurangnya areal hak pengusahaan hutan. Banyak pendatang Jawa yang menjadi pekerja dalam upaya merintis areal (*blocking* dan *land clearing*) lahan-lahan perkebunan besar tersebut. Dengan demikian, jumlah penduduk Jawa semakin bertambah secara signifikan. Berikut tabel yang menggambarkan persentase jumlah penduduk Kotawaringin Timur:

No.	Kelompok Etnis	Persentase
1	Dayak	53,18
2	Banjar	17,05
3	Jawa	18,08
4	Madura	7,00
5	Bugis	0,34
6	Sunda	1,29
7	Tionghoa	0,38
8	Lain-lain	2,69

Tabel 3. Persentase jumlah penduduk Kotawaringin Timur berdasarkan kelompok etnik pada tahun 2000 (Yusri Darmadi, 2016)

Seperti halnya masyarakat Tionghoa yang lebih banyak terkonsentrasi di Kota Sampit, sebagian besar Banjar juga lebih banyak berada di wilayah-wilayah sekitar Sampit, meskipun beberapa juga ada yang menetap di daerah-daerah sekitar aliran sungai ke arah selatan atau muara sungai. Berbeda dengan masyarakat Jawa yang walaupun jumlahnya relatif cukup banyak di Kota Sampit, namun seiring dengan persebaran areal-areal perkebunan kelapa sawit, mereka lebih banyak tersebar di hampir setiap wilayah Kotawaringin Timur. Sehingga, secara persentase, jumlah mereka relatif lebih besar dibandingkan dengan masyarakat Banjar.

Demikian halnya dengan Madura, yang meskipun dalam hal pekerjaan memiliki kultur yang relatif sama dengan Jawa, namun penguasaan mereka pada sektor-sektor informal yang berkembang lebih banyak terkonsentrasi di wilayah-wilayah sekitar Kota Sampit. Artinya, persentase jumlah penduduk berdasarkan kelompok etnis pada tabel tersebut hanyalah menggambarkan

komposisi penduduk secara umum di Kotawaringin Timur hingga tahun 2000; sama sekali tidak menggambarkan persentase kelompok etnik di Kota Sampit.

Menurut Yusri Darmadi dan tim, yang dikutip dari Herry Yogaswara (2016: 28), pada tahun 2000, persentase jumlah penduduk Madura di Kota Sampit telah mencapai 19%. Jumlahnya ini secara faktual sekitar 4.088 jiwa dari 21.511 jiwa jumlah penduduk Kota Sampit saat itu.²⁰ Jumlah ini tentu terbilang relatif cukup besar dibandingkan lainnya untuk komposisi jumlah pendatang di Kota Sampit saat itu. Sebagaimana jumlah penduduk Jawa terhadap penduduk lain di Kotawaringin Timur, maka penduduk Madura di Kota Sampit kemungkinan juga bisa menjadi yang terbesar kedua setelah masyarakat Dayak.

Kendati demikian, jumlah penduduk Madura yang mencapai sekitar 4000-an jiwa ini tentu hanyalah angka berdasarkan wilayah administrasi. Secara sosiologis, tentu tidak mencerminkan kondisi yang aktual. Sebab, secara administratif, wilayah Kota Sampit hanya meliputi Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang, yang luas keduanya hanya sekitar 1.365 km². Sementara itu, aktivitas-aktivitas mereka, khususnya sektor-sektor ekonomi informal tertentu, kerap kali justru tidak lagi mengenal batas-batas wilayah administrasi. Belum lagi hal ini menyangkut kasus-kasus administrasi kependudukan pada masa lalu. Bahwa tidak semua pendatang, baik itu Madura ataupun pendatang lainnya, teridentifikasi atau tercatat dengan baik. Artinya, dalam struktur ekonomi dan sosial kependudukan yang terbentuk di Kota Sampit, jumlah Madura secara aktual saja bisa jadi melebihi 19%.

²⁰ Jumlah penduduk Sampit tahun 2000 berdasarkan data BPS Kotawaringin Timur tahun 2000 yang diperoleh dari BPS Kotim; <https://kotimkab.bps.go.id>.

Persentase jumlah penduduk berdasarkan etnik ini tentu hanya menggambarkan kondisi struktur sosial yang masih relatif statis. Belum mencerminkan kondisi sosial yang terbentuk akibat dinamika perkembangan kota dan komposisi jumlah penduduk pendatang, baik Jawa dan Madura di Sampit saat itu.

3. Kondisi Munculnya Disintegrasi di Sampit

Pengalaman sejarah tentang kondisi disintegrasi sosial antar-kelompok etnis pada tahun 2001 tentu telah menandakan bahwa ada yang salah dalam pola-pola hubungan antarkelompok etnis di Kota Sampit. Namun, untuk memahami pola-pola hubungan antarkelompok etnik pada masa itu, pastinya tidaklah mudah dan sederhana. Sebab, menyangkut struktur sosial masyarakat di Sampit yang sangat kompleks. Maka dari itu, kami akan mengulasnya melalui aktivitas-aktivitas tertentu yang terjadi di Kota Sampit. Salah satunya adalah yang terjadi pada pelabuhan bongkar muat. Sebab, aktivitas-aktivitas pelabuhan, khususnya pelabuhan bongkar muat, menjadi salah satu tempat yang paling dinamis seiring dengan perubahan dan perkembangan Kota Sampit sebagai pusat perdagangan sekaligus industri saat itu. Pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan Pelindo.

Berbeda dengan Pelabuhan Oelin (kayu), Pelabuhan Pelindo merupakan pelabuhan khusus bongkar dan muat barang-barang perdagangan. Sementara itu, Pelabuhan Oelin merupakan lokasi pemuatan hasil kayu olahan dari pabrik Bruynzeel atau Inhutani ke *tongkang* atau kapal angkut sebelumnya. Letak kedua pelabuhan ini sesungguhnya hanya bersebelahan. Jika menghadap ke Sungai Mentaya, maka letak Pelabuhan Oelin berada di posisi kiri,

sedangkan Pelabuhan Pelindo di sebelah kanan. Tidak juga pernah jelas mana yang lebih dahulu berdiri di antara kedua pelabuhan di Kota Sampit tersebut.

Meskipun Pelabuhan Oelin telah digunakan Bruynzeel seiring dengan dimulainya aktivitas pengiriman hasil pengolahan kayu-kayu hasil hutannya akhir dekade 1940-an, namun pelabuhan yang dibangun Belanda pada tahun 1859 ini juga belum jelas. Sebab, jika ditinjau dari peran dan fungsinya sebagai pelabuhan bongkar muat barang, maka Pelindo sejatinya sudah mulai melakukan aktivitas-aktivitasnya, jauh sebelum Bruynzeel didirikan. Terutama ketika digunakan untuk memuat dan mengirim hasil-hasil komoditas perkebunan lokal, seperti karet, gambir, sawit, kelapa bulat, dan sebagainya yang diusahakan sejak awal tahun 1900-an.

Walaupun tidak pernah diperoleh informasi sejak kapan mulai berdiri, di Pelabuhan Pelindo, ternyata terdapat lembaga atau organisasi yang menaungi para pekerja atau buruh bongkar muat. Namanya adalah Usaha Karya, atau yang kerap disebut dengan UK (baca: Uka). Tidak jelas sejak kapan pengorganisasian buruh ini mulai ada. Sebab, melalui peristiwa pada tahun 1965, tidak ada juga informasi yang mengindikasikan adanya aktivitas organisasi atau individu buruh di Sampit yang berafiliasi dengan partai terlarang dan telah dibubarkan tersebut. Hal itu dikarenakan buruh atau para pekerja kelas bawah pada masa lalu umumnya kerap menjadi sasaran pengorganisasian dan propaganda politik mereka saat itu. Selain memang hampir tidak ada informasi, gejala peristiwa di Sampit ketika itu juga sangat minim. Satu-satunya fakta dan informasi yang ada justru menguatkan bahwa berdirinya organisasi para buruh bongkar muat ini berhubungan dengan upaya infiltrasi politik Orde Baru melalui Partai Golongan Karya. Organisasi Usaha Karya yang kemudian berubah namanya

menjadi Yayasan Usaha Karya ini memiliki nama yang identik dengan partai ini. Selain itu, ketua atau pemimpin organisasi ini sejak awal juga sudah berafiliasi dengan partai tersebut. Barulah pada tahun 1990, Yayasan Usaha Karya yang menaungi para buruh pelabuhan ini berubah namanya menjadi TKBM, tetapi masih dalam bentuk organisasi yang sama, yaitu Yayasan Tenaga Kerja Bongkar Muat, atau yang kerap disebut dengan nama singkatnya, yakni TKBM.

TKBM dipimpin oleh seorang tokoh Madura yang cukup dikenal dan karismatik berinisial H. M.²¹ Bahkan, jauh sebelum itu, ketika namanya masih Usaha Karya, tokoh bernama H. M. ini juga sudah mulai memimpin atau mengepalai organisasi ini. Hal itu diketahui dari seorang informan berinisial H. Mst yang menuturkan bahwa sejak ia menjadi anggota atau bekerja di pelabuhan tahun 1971, H. M. sudah menjadi pemimpin atau Kepala Usaha Karya. Artinya, H. M. telah mengepalai atau memimpin organisasi ini sejak namanya masih UK (Usaha Karya), lalu menjadi Yayasan Usaha Karya, dan terakhir Yayasan TKBM.

Sebagaimana informasi yang dituturkan selanjutnya oleh H. Mst, tokoh berinisial H. M. ini berhenti menjadi Kepala TKBM sejak tahun 2001, atau saat terjadi kerusuhan sosial antar-kelompok yang melibatkan massa secara masif di wilayah Kota Sampit. Sejak saat itu pula, H. M. pergi meninggalkan Sampit sekaligus meninggalkan peran dan pengaruhnya sebagai Kepala TKBM sekaligus salah satu tokoh Madura yang karismatik dan anggota DPRD Kotawaringin Timur.

²¹ Selain H. M., ada dua lagi tokoh yang cukup dikenal dan berpengaruh kuat terhadap masyarakat Madura, yaitu H. Ism dan H. Stm. Dari ketiga tokoh Madura tersebut, hanya H. Ism yang diperkirakan masih hidup, dan saat ini menetap di Banjar.

Dua hal yang senantiasa diingat para informan dan menjadi bagian dari prestasi kepemimpinan H. M. adalah adanya perumahan khusus bagi para buruh TKBM yang telah dibangun pada masa-masa kepemimpinannya, dan dominannya Madura sebagai buruh bongkar muat saat itu. Tentu bukan hal yang mudah membangun perumahan khusus para pekerja atau buruh bongkar muat pelabuhan yang proses kepemilikannya harus dicicil para anggota melalui Yayasan TKBM. Pada umumnya, pekerja atau buruh bongkar muat pelabuhan, di mana pun mereka berada, relatif memiliki karakter kaku dan susah diatur karena pendidikannya yang rendah dan penghasilan tidak tetap. Tetapi, keberhasilan untuk membuat perumahan khusus bagi para buruh bongkar muat pelabuhan ini jelas telah menggambarkan betapa kuat dan besarnya pengaruh H. M. di kalangan buruh sekaligus menggambarkan betapa tingginya kesibukan aktivitas yang ada di pelabuhan bongkar muat atau Pelindo saat itu.

Kemampuan para buruh mengangsur kepemilikan rumah tersebut juga menggambarkan relatif tingginya pendapatan tidak tetap yang mereka peroleh. Sementara itu, pendapatan tidak tetap yang tinggi itu pada gilirannya juga telah menggambarkan tingginya aktivitas-aktivitas bongkar muat yang terjadi. Sebab, pola penghasilan atau pendapatan buruh bongkar muat akan sangat tergantung pada aktivitas bongkar muat kapal-kapal yang merapat di pelabuhan. Artinya, tingginya aktivitas-aktivitas bongkar muat kapal di Pelabuhan Pelindo ini juga menunjukkan tingginya aktivitas-aktivitas perdagangan yang terjadi di Kota Sampit. Tingginya aktivitas-aktivitas perdagangan yang ada dan terjadi ini kemudian juga menandai adanya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan signifikan, khususnya di Kota Sampit, dan Kotawaringin Timur secara umum.

Demikian halnya perumahan khusus bagi pekerja atau buruh bongkar muat pelabuhan ini, atau yang kerap kali hanya disebut dengan buruh UKA, tentu menjadi telaah yang menarik. Salah satunya adalah ketika gagasan untuk membangun perumahan khusus bagi buruh pelabuhan ini ternyata dapat direspons dengan sangat baik oleh mereka. Setidaknya, secara faktual, perumahan ini memang sudah terbangun saat ini. Hal itu memang menjadi kebutuhan mereka, namun juga didukung fakta bahwa sebagian besar dari para buruh pelabuhan ini adalah Madura. Dengan kata lain, perumahan khusus bagi para buruh ini memang digagas oleh individu atau organisasi yang dipimpin seorang tokoh dengan identitas kelompok yang sama dengan sebagian besar dari mereka. Sehingga, proses-prosesnya relatif tidak terlalu sulit untuk direalisasikan ketimbang terhadap mereka yang beragam identitas kelompok etnisnya. Sebab, hal ini menyangkut pola kepercayaan dan pengaruh ketokohan dalam intern kelompoknya, hubungan resiprokal atau pertukaran nilai secara sosial dalam kelompoknya, dan kultur yang relatif sama.

Memiliki rumah sendiri tentu menjadi kebutuhan bagi semua orang, apa pun profesinya. Termasuk para buruh pelabuhan yang rata-rata memiliki pendapatan relatif tidak tetap. Fokusnya tentu bukan pada kebutuhan atau keinginan mereka dan gagasan yang disampaikan. Tetapi, pada proses merealisasikan perumahan khusus bagi para buruh pelabuhan tersebut yang berlangsung selama ini.

Proses angsuran pembayaran rumah yang dilakukan oleh mereka selama ini ternyata berjalan lancar, tanpa kendala, hingga kemudian dimiliki oleh mereka. Setidaknya, sampai sekarang, tidak pernah ada informasi yang menyebutkan bahwa rumah-rumah tersebut bermasalah dalam proses angsurannya. Sedangkan,

masyarakat kelas bawah, apa pun profesi dan identitas kelompok etniknya, pada umumnya akan sulit diajak disiplin. Terlebih untuk disiplin membayar atau menyisihkan sebagian waktu yang dapat menghasilkan guna mengangsur pembayaran. Sebab, mereka adalah pekerja semilepas. Artinya, meskipun mereka terikat secara organisasi, yaitu TKBM, namun jam dan hari kerja akan tergantung pada kemauan mereka sendiri. Besarnya pendapatan atau penghasilan sebagai pekerja atau buruh pelabuhan tentu akan tergantung pada jumlah aktivitas kerja bongkar muat yang mereka miliki. Apalagi, kartu keanggotaan buruh atau organisasi ini bisa diserahkan kepada orang lain yang bukan anggota. Tentunya, dengan kesepakatan atau kesepemahaman di antara mereka.

Agak rumit memang untuk dapat memahami hal seperti itu. Namun, yang pasti, keberhasilan dari proses awal hingga perumahan itu dapat dimiliki oleh mereka tentu menggambarkan kondisi yang lain, yakni seorang H. M. bisa meyakinkan atau bahkan mempengaruhi para anggotanya yang terlibat untuk mengambil rumah agar tetap disiplin membayar dengan cara tetap melakukan aktivitas bongkar muat. Termasuk H. M. dapat memperoleh areal lahan yang akan dibangun perumahan khusus bagi para buruh pelabuhan tersebut. Betapa hebatnya ia bisa meyakinkan para pemilik modal atau mendapatkan modal awal, dan cara ia meyakinkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pembangunannya. Kemampuan ini tentu telah menggambarkan betapa luasnya koneksi jaringan dan pengaruh H. M. saat itu.

Selain H. M., pada kelompok Madura Sampit juga dikenal dua orang tokoh lain yang memiliki kemampuan koneksi atau jaringan dan pengaruh yang sama. Tetapi, berbeda dengan H. M. yang konon asli kelahiran Sampit dan sebelumnya hanya merupakan

seorang kepala buruh, sekalipun akhirnya ia juga menjadi anggota dewan, kedua orang tokoh yang dimaksudkan ini adalah murni pengusaha. Kesamaan dari ketiga orang ini justru adalah mereka berasal dari kelas bawah atau merintis karier ketokohan dari seorang anggota masyarakat biasa.

Sementara itu, dalam konteks yang berbeda, juga diperoleh keterangan atau informasi bahwa pada awal-awal H. M. menjadi Ketua UKA, keberadaan pendatang Madura di Kota Sampit juga semakin menunjukkan jumlahnya yang signifikan. Meskipun waktu mulainya H. M. menjadi Ketua UKA dan keberadaan masyarakat Madura yang semakin besar jumlahnya di Kota Sampit ini juga bertepatan dengan awal-awal maraknya industri-industri kehutanan dan eksploitasi hasil kayu hutannya di Kotawaringin Timur ketika itu.

Selain sebagai buruh bongkar muat pelabuhan yang keberadaannya menjadi mayoritas saat itu, sebagian dari mereka juga banyak yang bekerja pada sektor-sektor industri kehutanan dan pengolahan kayu hasil hutannya. Sesuai dengan etos kerja, kebiasaan yang lebih banyak menggunakan tenaga fisik, dan sikap yang memang tidak memilih-milih jenis pekerjaan, itu membuat mereka lebih banyak terserap pada jenis-jenis pekerjaan kasar, namun dengan penghasilan relatif besar.

Sebagai contohnya ialah pematang atau orang-orang yang menebang kayu di hutan-hutan, sekaligus para pekerja atau mereka yang mengangkut kayu-kayu *log* dari dalam hutan, baik melalui darat ataupun sungai, serta pekerjaan-pekerjaan tertentu dalam *bandsaw* atau *sawmill-sawmill* mini, termasuk di Bruynzeel dan lain sebagainya. Bahkan, seorang informan yang menjadi salah satu *top management* pada Inhutani 3 menyebutkan angka lebih dari 600 jiwa yang menjadi bawahannya saat menjadi kepala

unit, yaitu pada bagian *moulding*. Jumlah ini tentu belum termasuk mereka yang bekerja pada bagian-bagian atau unit lainnya. Sementara yang lain, atau yang memilih tidak bekerja pada industri kehutanan dan buruh pelabuhan, mereka lebih memilih mengembangkan atau bekerja pada sektor-sektor informal seiring dengan semakin tumbuh dan maraknya aktivitas-aktivitas yang terjadi di Kota Sampit, baik siang maupun malam. Demikian seterusnya hingga persentase keberadaan mereka di Kota Sampit atau Kotawaringin Timur secara umum menjadi signifikan. Meskipun secara akumulatif, jumlah mereka ini ternyata hanya mencapai 19% dari keseluruhan jumlah penduduk Kota Sampit.

Persoalannya tentu bukan lagi pada jumlah, tetapi dominasi mereka pada jenis-jenis pekerjaan atau kegiatan di sektor-sektor tertentu. Setidaknya, dominasi pada jenis-jenis pekerjaan atau kegiatan ekonomi yang secara umum relatif tidak atau kurang menjadi perhatian ataupun diminati kelompok masyarakat lain. Satu-satunya kompetitor pada jenis-jenis pekerjaan atau kegiatan ini adalah kelompok pendatang yang sama, yaitu Jawa. Kelompok pendatang yang relatif lebih banyak tersebar di hampir semua jenis pekerjaan, semua aktivitas, semua kelas, dan semua wilayah kecamatan atau pedalaman; terutama saat mulai maraknya pembukaan areal lahan-lahan perkebunan.

Masyarakat lokal, dalam kultur etos kerja yang terbentuk karena ketersediaan sumber-sumber daya alam dan lahan yang melimpah, secara ekologi kultural tentu cenderung memilih pekerjaan atau kegiatan-kegiatan usaha yang relatif tidak membutuhkan persaingan.²² Oleh sebab itu, selain buruh pelabuhan

²² Alam sebagai sumber utama mata pencaharian, kecuali saat maraknya kasus-kasus perusahaan kayu-kayu hutan cenderung mereka gunakan, manfaatkan, dan kelola secara subsisten; sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga, hampir tidak ada tekanan yang muncul karena adanya persaingan untuk bertahan hidup di antara mereka. Kondisi ini membuat sebagian mereka menjadi tidak terbiasa dengan

bongkar muat, sebagian dari mereka juga mendominasi sektor-sektor informal, seperti buruh-buruh angkut barang di pelabuhan penumpang atau pasar, jasa transportasi lokal, baik itu barang maupun orang, pengamanan pasar, kuli bangunan, penjual dan penyedia bahan baku makanan sehari-hari, dan sebagainya. Termasuk perusahaan tanaman bahan baku pangan melalui pemanfaatan areal-real lahan sekitar di wilayah Kota Sampit.

Persoalan selanjutnya tentu pada dominasi aktivitas tertentu. Akibat dominasi pada sektor-sektor ini, ekosistem sosial menjadi tidak ideal. Interaksi yang terjadi antara pihak penyedia dan pengguna pada sektor-sektor tertentu menjadi tidak ideal. Saat eksploitasi dan industri-industri kehutanan masih marak terjadi, pertukaran sosial berupa nominal balas jasa, imbalan, atau harga suatu jasa dan barang, tentu tidak menjadi persoalan. Selain karena peredaran uang tunai yang relatif besar akibat maraknya industri-industri kehutanan, mudahnya orang mendapatkan uang tunai dari berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan emas hijau saat itu juga masih sangat mendukung. Namun, ketika kondisi ekonomi mulai menurun,²³ sumber daya hutan mulai menipis, yang ditandai dengan habisnya masa izin beberapa HPH, termasuk berhentinya aktivitas pabrik Bruynzeel tahun 1997. Maka, interaksi pada sektor-sektor tertentu menjadi terganggu dan tidak seimbang. Bahkan, kerap kali pihak yang merasa dominan cenderung mengingkari kesepakatan atau memaksakan kesepakatan baru ketika suatu proses justru sudah berlangsung atau bahkan sudah berakhir. Hingga persoalan-persoalan ini

jenis-jenis dari pekerjaan yang tidak semata hanya membutuhkan fisik tenaga, namun juga kedisiplinan waktu dan kerja yang tinggi.

²³ Ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi secara nasional sejak tahun 1996.

secara akumulatif menjadi *stereotype* tersendiri yang akhirnya menimbulkan pergesekan sosial.

Lalu, apa hubungannya dengan masyarakat Madura?

Dalam kasus-kasus tertentu, mereka cukup mendominasi aktivitas-aktivitas yang ketika terkena dampak dari menurunnya kondisi ekonomi relatif tidak memiliki substitusi kegiatan.

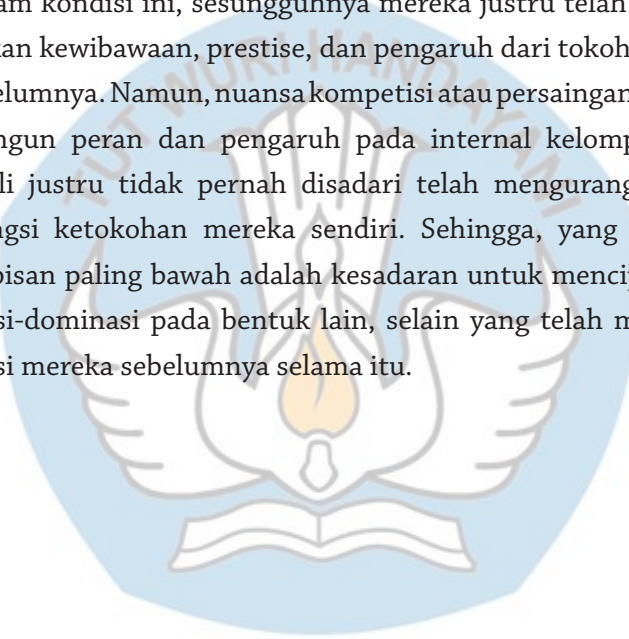
Dalam kondisi-kondisi yang lain, konon ada juga beberapa tokoh lain yang karena mobilitas ekonominya secara vertikal, akhirnya mereka mengambil peran dan menciptakan pengaruh yang sama dalam kelompok, sebagaimana tokoh-tokoh lain sebelumnya, tetapi dengan cara yang berbeda.

Dalam kelompok masyarakat Madura Sampit saat itu, ada bentuk kegiatan arisan, atau mungkin lebih tepatnya sumbangan sosial dari sesama anggota. Fungsi utamanya adalah membangun komunikasi, silaturahmi, dan membantu sesama anggota yang mendapatkan musibah. Namun, fungsi dari hasil bentuk kegiatan ini justru kerap disalahgunakan oleh oknum untuk membantu anggotanya yang berurusan dengan aparat hukum.²⁴ Berbekal jaringan koneksinya dengan aparat, dan uang yang terkumpul dari hasil sumbangan sesama mereka ini, ia selalu berperan untuk membantu anggota kelompoknya yang berurusan dengan aparat. Sementara itu, pada sisi yang lain, oknum aparat dan sistem sosial yang terbentuk saat itu (Orba) justru sedang berada pada level terbawah dalam hal integritas dan komitmen terhadap penegakan hukum. Sehingga, terciptalah simbiosis mutualisme antara oknum yang diuntungkan oleh nilai berupa kewibawaan,

²⁴ Informasi ini belum terverifikasi dengan valid, karena diperoleh dari kelompok masyarakat yang lain atau berbeda. Namun, yang jauh lebih penting adalah alasan informasi seperti itu terbentuk, kecuali hanya dengan sering kalinya persoalan-persoalan tersebut ditemui atau diketahui oleh mereka.

prestise, atau pengaruh dalam internal kelompoknya, meskipun semu, dengan oknum aparat hukum yang diuntungkan karena materi atau nilai-nilai sosial lainnya.

Dalam kondisi ini, sesungguhnya mereka justru telah menghancurkan kewibawaan, prestise, dan pengaruh dari tokoh-tokoh lain sebelumnya. Namun, nuansa kompetisi atau persaingan dalam membangun peran dan pengaruh pada internal kelompoknya acap kali justru tidak pernah disadari telah mengurangi nilai dan fungsi ketokohan mereka sendiri. Sehingga, yang terjadi pada lapisan paling bawah adalah kesadaran untuk menciptakan dominasi-dominasi pada bentuk lain, selain yang telah menjadi dominasi mereka sebelumnya selama itu.



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



Daftar Pustaka

Buku:

Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Basri, Hasan. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.

Darmadi, Yusri, Yusriadi, dan Rezza Maulana. 2016. *Diaspora Masyarakat Cina di Sampit pada 1847 sampai 1942*. Yogyakarta: Kepel Press.

Gottschalk, L. 1985. *Understanding History*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Haviland, William A. 1993. *Antropologi*. Jakarta: Erlangga.

Horton, Paul & L. Chester Hunt. 1987. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.

Ideham, M.S. 2003. *Sejarah Banjar*. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kalimantan Selatan, Banjarmasin.

- Johnson, Doyle Paul. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kaplan, David dan Robert A. Manners. 2002. *Teori Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartodirdjo, Sartono. 1999. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500–1900*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kasdi, Aminuddin. 2000. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa Press.
- Keesing, Roger M. 1981. *Antropologi Budaya; Suatu Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Erlangga.
- Muljana, Slamet. 2006. *Tafsir Sejarah Nagara Kretagama*. Yogyakarta: Lkis.
- Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat. 1998. *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasikun. 2001. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Obidzinski, Krystof et al. 2006. *Penyelundupan Kayu di Indonesia, Masalah Genting ataukah Berlebihan; Pembelajaran Pengaturan Hutan dari Kalimantan*. CIFOR, Center for International Forestry Research. Jakarta: Harapan Prima.
- Rafika, Fahmi. 2008. *Integrasi Sosial Muslim-Tionghoa*. Yogyakarta: Mystico.
- Soekanto, Soejono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soelaeman, Munandar. 2008. *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Syamsudin, Helius. 2001. *Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859–1906*. Jakarta: Balai Pustaka.

Zuhdi, Susanto Jati dan Galih Pangestu (ed.). 2016. *Cilacap (1830–1942): Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa*. Yogyakarta: Ombak.

Jurnal:

Fatwa, Fajrudin. 2013. “Doktrin Konflik dan Integrasi Sosial”. *Jurnal Humaniora*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2013 (hlm. 55–56).

Marzali, Amri. 2014. “Kemajemukan Kebudayaan Nasional Indonesia”. *Jurnal Kebudayaan*, Vol. 26 No. 3 Tahun 2014.

Buletin:

Kajian Ekonomi Kalimantan Tengah; Triwulan III, Tahun 2012. *Buletin Bank Indonesia*.

Kalimantan Tengah dalam Angka. 2012. Badan Pusat Statistik Daerah Kalimantan Tengah, Palangkaraya.

Website:

Badan Pusat Statistik Kotawaringin Timur, Hasil SP Tahun 2000, diakses 20 Oktober 2018 dari <https://kotimkab.bps.go.id>.

Gubernur Kalteng Kritik Sawit Watch, Berita pada kompas.com, kutip pada 20 Oktober dari <https://internasional.kompas.com>.

Najeri, M. Al Syahrin. *Sejarah Pegatan Katingan Kuala Kajian Historis dan Dinamika Transisi Kepemimpinan Mendawai, Kotim, dan Katingan (Bagian 2)*, dikutip dalam <http://nazryalsyahrin.blogspot.com>.

NBVA Portal, *Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen*, informasi diperoleh 17 Oktober 2018; <https://www.nvbs.com>.

Op de rail, *Van Schoonoord naa sampit*; diakses 17 Oktober 2018, <https://issuu.com>.

PT Eksploitasi dan Industri Hutan III, Profil Perusahaan BUMN Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Tahun 2012, akses diperoleh pada 18 Oktober dari <http://bumn.go.id>.



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

DINAMIKA DAN INTEGRASI SOSIAL

DALAM PENGARUH INDUSTRI-INDUSTRI KEHUTANAN

DISAMPIT 1957 - 2001

Sampit memang pernah dikenal karena peristiwa konflik antar etniknya yang terjadi tahun 2001. Namun jauh sebelum itu, Sampit sesungguhnya juga sudah mulai dikenal seiring dengan dibukanya pelabuhan bersamaan dengan 16 pelabuhan lain di Jawa dan 2 di Sumatera oleh Belanda tahun 1865. Perkembangan Sampit selanjutnya adalah saat *Bruynzeel Dayak Houthbedrijven NV* didirikan tahun 1947, yang menandai arah perkembangan Sampit sebagai pusat industri pengolahan kayu hutan, sekaligus perdagangan di Kalimantan Tengah.

Sampit semakin mulai menunjukkan geliatnya di awal dekade 1970-an, ketika industri kehutanan berupa pabrik-pabrik pengolahan kayu, baik besar maupun kecil mulai bermunculan di Kotawaringin Timur. Keberadaan ini menggenapi aktivitas *Brunzeel* sebagai pabrik kayu terbesar di Indonesia, bahkan di Asia pada masanya yang semakin berkembang. Pada gilirannya, kondisi-kondisi seperti ini mendorong maraknya urbanisasi atau hadirnya para pendatang ke wilayah Kota Sampit. Berbeda dengan dua dekade saat awal-awal pengoperasian *Brunyzeel* oleh Indonesia, pada masa ini Kota Sampit dan struktur sosial masyarakatnya mengalami perkembangan yang berarti.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



KTE - 9
N



PENELITIAN

ISBN: 978-602-391-677-1

